



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI IV DPR RI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Dengan : Menteri Pertanian Republik Indonesia
Hari, Tanggal : Senin, 20 September 2021
Waktu : Pukul 10.40 s.d. 15.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta
- Ketua Rapat : SUDIN, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara : Membahas Penyesuaian RKA-KL 2022 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Tommy
Hadir : A. Anggota DPR RI:
31 dari 54 orang Anggota Komisi IV dengan rincian:
1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)
6 dari 11 orang Anggota
 1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 2. Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 3. Ir. Mindo Sianipar
 4. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
 5. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
 6. Maria Lestari, S.Pd.
 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)
4 Dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil ketua
 2. Ir. Hanan A. Rozak, M.Si.
 3. Ir. Ichsan Firdaus
 4. Alien Mus
 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-GERINDRA)
2 dari 7 orang Anggota
 1. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari Dess., M.Sc.
 2. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrasi (F-NASDEM)
2 dari 6 orang Anggota
 1. H. Sulaeman L. Hamzah
 2. Julie Sutrisno
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
5 dari 6 orang Anggota
 1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil ketua
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Daniel Johan, S.E.
 4. H. Irmawan, S.Sos., M.K.N.
 5. Edward Tanur, S.H.
6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Hj. Nur'aeni, S.Sos, M.Si.
 4. Muslim, S.Hi., M.M.
 5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
4 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
 3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
 4. Saadiah Uluputty, S.T.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
1 dari 4 orang Anggota
 1. Haerudin, S.Ag., M.H.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. Ema Umiyyatul Chusnah.
 2. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.

B. Pemerintah.

1. Harvick Hasnul Qolbi (Kuasa Menteri Pertanian/Wakil Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
4. Prof. (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
5. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);

6. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian);
7. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia *Holding Company*;
8. Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero);
9. Karyawan Gunarso, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri (Persero) hadir secara virtual;
10. Maryono, Direktur Utama PT Pertani (Persero) hadir secara virtual; dan
11. Harry Warganegara, Direktur Utama PT Berdikari (Persero).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Salah satu Anggota mendampingi saya di sini, Pak Suhardi Duka duduk sini Pak. Ya, besok Bapak bisa jadi Pimpinan.

Bisa kita mulai?

Sebelum saya mulai ini ada surat permohonan ijin Rapat Kerja dari saudara Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, karena yang bersangkutan sedang menghadiri *Agriculture Minister Meeting* dan diwakili oleh Pak Wamen dan ada surat kuasanya. Dan ini menurut MD3 dapat dijalankan. Termasuk juga surat pemberitahuan dari Pimpinan MKD bahwa boleh diwakili oleh Wamen.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Wakil Menteri Pertanian beserta jajaran,

Yang terhormat Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia *Holding Company*,

Yang terhormat Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia,

Yang terhormat Direktur Utama Sang Hyang Seri.

Sang Hyang Seri inikan sudah likuidasi belum, apa Pertani yang likuidasi? Oh, *merger*. Jadi Pertani sudah nggak ada lagi? Oh, sekarang masih. 1,5 bulan lagi Mulyono *out* ya? Ya sudah.

Yang terhormat saudara Direktur Utama Berdikari, kok nggak kelihatan mana dia?

Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur keharadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus dan Rapat Internal Komisi IV DPR RI, maka hari ini Senin 20 September 2021, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dalam rangka membahas penyesuaian dalam rangka membahas penyesuaian RKA K/L 2022 sesuai dengan pembahasan Badan Anggaran.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Sesuai ketentuan Pasal 276 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Rapat Kerja ini kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)

Raker ini kita mulai pada pukul 10.40 WIB dan akan diakhiri pada pukul 14.40 WIB. Apabila belum selesai dapat di sesuaikan dengan Pasal 254 Ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama. Dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Kementerian Pertanian terhadap agenda rapat hari ini;
3. Tanggapan Komisi IV DPR RI;
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas Komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (2) peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib adalah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi. Berdasarkan hasil sinkronisasi, alokasi anggaran Kementerian/Lembaga atau Badan Anggaran dan Komisi menyerahkan kembali hasil pembahasan Komisi sebagai bahan akhir penetapan APBN. Yang mana kami menerima surat dari Badan Anggaran selambat-lambatnya tanggal 24 September 2021 sudah harus masuk ke Badan Anggaran.

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 170 Ayat (20 sampai dengan Ayat (4) bahwa Anggota Badan Anggaran dari Komisi bersama Badan Anggaran

membahas alokasi anggaran Kementerian/Lembaga yang telah diputuskan oleh Komisi dan hasil pembahasan disampaikan kembali secara tertulis.

Selanjutnya Komisi bersama mitra kerja membahas alokasi anggaran dan hasil pembahasannya disampaikan untuk mendapat penetapan. Perlu kami ketahui bahwa pelaksanaan Rapat Kerja ini adalah berdasarkan surat Badan Anggaran Nomor AG/09710/DPRRI/VII/2021, tanggal 28 Juli 2021 mengenai penyampaian perubahan rancangan pembahasan Rencana Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2022 serta surat Badan Anggaran Nomor AG/12436/DPRRI/IX/2021, tanggal 16 September 2021 mengenai penyampaian hasil pembahasan Rencana Undang-Undang APBN Tahun 2022.

Berdasarkan surat Anggaran tersebut tanggal 16 September 2021 tentang hasil pembahasan Panja Belanja Pusat dalam rangka pembiraan tingkat I pembahasan Rencana Undang-Undang tentang APBN Tahun 2022, yaitu alokasi anggaran belanja Kementerian Pertanian sebesar Rp14.451.000.000.000,- untuk itu pada Rapat Kerja hari ini akan melakukan penajaman dan melakukan persetujuan Pagu Anggaran mengacu kepada rancangan rencana kerja dan program yang telah diusulkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI mengingatkan kepada semua pihak dari Kementerian Pertanian dan seluruh jajarannya agar dalam merancang program kegiatan harus fokus pada pemulihan ekonomi nasional yang sifatnya berdampak jangka pendek dan jangka panjang terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Untuk itu, pada hari Rapat Kerja hari ini Komisi IV DPR RI mengingatkan kembali agar program kegiatan harus bersifat massif, volume besar, dan fokus pada kegiatan strategi yang berdampak nasional, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan akan lebih terasa dampaknya bagi masyarakat dalam hal ini petani.

Pada rapat terdahulu Komisi IV DPR RI telah meminta saudara Menteri beserta jajarannya untuk merancang usulan-usulan kegiatan program dan anggaran termasuk alokasi anggaran dukungan manajemen di seluruh Eselon I Kementerian Pertanian yang dinilai masih terlalu besar. anggaran BPPSDMP juga perlu disisir dan disempurnakan kembali lebih jelas, terukur target dan *output*-nya. Selain itu perlu dilakukan evaluasi program yang menggunakan anggaran untuk pembangunan.

Adapun dana perjalanan dinas pusat ke daerah, perjalanan luar negeri, kegiatan-kegiatan rapat kordinasi, dan acara seremonial dinilai masih sangat besar sekali dan perlu dialokasikan ke kegiatan-kegiatan dibutuhkan oleh petani, sehingga lebih bermanfaat dan berdampak kepada peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani, diantaranya adalah sarana dan prasarana pertanian, alat mesin pra panen, pasca panen, bibit benih berkualitas, bantuan ternak unggul, hingga sarana pasca panen, dan pengolahan hasil pertanian. Selain itu, kegiatan Perkarangan Pangan Lestari

dapat di perbanyak, ini dinilai sangat bermanfaat dan masih dibutuhkan oleh petani.

Komisi IV DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian untuk mengembangkan, meningkatkan produksi komoditas pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi, diantaranya pengembangan karet alam, kelapa, pisang. Ada pun beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya adalah kegiatan bimbingan teknis dinilai masih dibutuhkan pengembangan pengetahuan petani dan peningkatan kesejahteraan petani.

Komisi IV DPR RI juga meminta terhadap 3 Eselon I lingkup Kementerian/Lembaga, Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Nasional, serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian yang berpotensi mengalami transformasi kelembagaan sebagai amanat dari Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Karantina Hewan dan Tumbuhan, serta Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Terkait hal tersebut, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mencermati hal tersebut di atas. Dan melakukan langkah antisipatif.

Komisi IV DPR RI nilai program dan kegiatan Kementerian Pertanian selama 5 tahun itu hanya merupakan pengulangan. saya tegaskan cuma pengulangan alias *copy paste* tidak ada satu pun terobosan. Oleh karena itu, perlu ada perubahan yang nyata dan bernilai bagi petani. Melalui rapat hari ini Komisi IV DPR RI merancang, rumuskan kegiatan program yang benar-benar menyentuh serta berdampak langsung kepada petani, sehingga mampu mendukung upaya pemulihan ekonomi secara nasional.

Sebelum saya mengakhiri pengantar ini, saya sampaikan kepada teman-teman Eselon I, Eselon II, Eselon III. Saya mengusulkan kepada Kementerian Pertanian Jalan Usaha Tani tiga kelompok, tetapi oleh Dinas Kabupaten Pesisir Barat dianggapnya tidak laik dan diganti oleh dinasnya. Jadi usulan yang saya usulkan itu diganti oleh dinasnya. Saya minta kepada Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi semua bantuan untuk Kabupaten Pesisir Barat.

Saya berpikir, saya bekerja hanya untuk rakyat petani bukan jargon karena perbedaan politik terus kami dipersulit. Karena kalau peningkatan produksi di suatu wilayah yang mendapatkan nama adalah kepala daerah. Contoh temannya Pak Hanan mendapat penghargaan dari Kementerian Pertanian yang diterima langsung dari Wapres. Yang dapat nama ya kepala daerah bukannya saya, ya saya begini-gini saja. Ya tolong dicatat ini para Eselon I, Eselon II yang hadir. Dan saya tetap akan evaluasi di lapangan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Demikian pengantar yang kami sampaikan, selanjutnya kami persilahkan kepada saudara Wakil Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut di atas.

Waktunya kami persilahkan.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Interupsi Pimpinan, dua menit.
Terima kasih atas kesempatan.

Pimpinan, Anggota yang terhormat,
Pak Wamen beserta Eselon I Kementan yang saya hormati.

Berdasarkan tadi pembicaraan Pimpinan, pertama kita minta ditunda sebelum internal kita diselesaikan pembicaraan antara Pimpinan dengan Kapoksi. Yang tentunya mengundang pihak mitra itu adalah kewenangan Pimpinan. Atas nama Kapoksi PAN, kami minta Rapat Kerja ini ditunda dulu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bukannya tadi Kapoksi sudah berkumpul, sudah konsultasi di atas.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Menguatkan jadi yang pertama bahwa nampaknya kita membaca hasil RDPU, mohon maaf hasil Rapat Dengar Pendapat tidak ada perubahan yang kemudian untuk kita masuk di Rapat Kerja hari ini. Di sisi lain kita juga ingin mendapatkan gambaran yang jelas dari Pimpinan, sehingga tadi Kapoksi justru memberikan kesepakatan bahwa kita ingin rapat ini ditunda. Kemudian Pimpinan menyampaikan kepada kita semuanya, selanjutnya kita ingin ketemu dengan Eselon I. itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang lain?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi begini Pimpinan, sebenarnya kita ingin menyelesaikan segera rapat ini. Hanya saja kita tidak akan memberikan tanggapan dua kali pada materi yang sama, karena materi Rapat Dengar Pendapat yang kemarin dengan materi yang disajikan kembali itu nggak ada perubahan, sama saja. Jadi buat

apa kita berikan tanggapan terhadap dua kali rapat dengan materi yang sama. Oleh karena itu, kami ingin ada perubahan yang disampaikan kepada kami terhadap tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat kemarin, ini yang kami tidak terima. Dengan demikian mohon Pimpinan bisa memfasilitasi kami atau memberikan penjelasan terhadap perubahan-perubahan yang mungkin kalau sudah ada atau kalau belum ada kita serahkan kepada Pimpinan.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke, rapat kota skors 15 menit untuk konsultasi. Kemudian kita balik ke ruangan ini lagi untuk segera menyelesaikan rapat. Kalau rapat ini ditunda sampai besok tidak bisa, hanya kita perlukan waktu 15 menit, karena tanggal 24 semua penyampaian harus masuk di Banggar. Rapat saya skors.

(RAPAT DISKORS)

(SKORS DICABUT)

Saudara Wakil Menteri Pertanian untuk menjelaskan agenda hari ini.
Silakan.

WAKIL MENTERI PERTANIAN RI (HARVICK HASNUL QOLBI):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Wa Syukurillah kita harus tetap mengucapkan *Hamdalah*, walaupun kita tahu beberapa tahun kebelakang adalah tahun *Amul Huzni*, tahun penuh duka, tahun kesedihan, karena begitu banyak sekali kerabat kita, keluarga besar kita, para guru kita, alim ulama kita, yang mendahului kita dipanggil pulang oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Namun demikian, bagi kita yang ditinggalkan yang masih hidup kita lanjutkan hidup kita dengan berbuat amal kebaikan, baik untuk diri kita sendiri juga untuk orang lain.

Terima kasih Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita berkesempatan hadir pada acara Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat.

Mengawali Rapat Kerja hari ini, perkenankan saya Wakil Menteri Pertanian Harvich Hasnul Qolbi, memohon ijin kami berbagi tugas dengan Pak Menteri, karena Pak Menteri kami sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka mewakili Pemerintah pada acara *Agriculture Minister Meeting G20* dan beberapa kegiatan lainnya. Dalam kunjungan kerja ke luar

negeri tersebut, Bapak Menteri Pertanian didampingi oleh Dirjen Hortikultura, Dirjen PSP yang merangkap Plt. Dirjen Perkebunan, Dirjen PKH, dan Kepala Badan Litbang Pertanian. Untuk itu mohon ijin masing-masing Dirjen dan Kepala Badan yang tidak hadir Raker hari ini diwakili oleh para Sesditjen, juga Sesbadan.

Saya dan jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangan Rapat Kerja hari ini Senin, 20 September 2021. Dengan agenda membahas penyesuaian rencana kerja anggaran RKA Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 sesuai pembahasan Badan Anggaran. Pada kesempatan Rapat Kerja hari ini saya beserta seluruh jajaran Kementerian Pertanian juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang telah menyampaikan berbagai saran dan masukan sebagaimana tertuang dalam kesimpulan Rapat Kerja tanggal 25 Agustus 2021. Dan laporan hasil Rapat Dengar Pendapat tanggal 7 dan 8 September 2021. Saran dan masukan yang konstruktif dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI selama Raker maupun RDP tersebut telah kami tindaklanjuti dan menjadikan perbaikan dalam menyusun kembali RKA Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sesuai dengan agenda Rapat Kerja hari ini, ijinkanlah kami melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian tahun penyediaan bahan baku industri dan ekspor dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Dan dalam rangka mendukung prioritas nasional, yaitu PN1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dan juga Program Prioritas (PP), yaitu PP3 peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan. Dan PP6 peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industri, maka kami menetapkan 5 program utama, yaitu:

1. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas;
2. Program nilai tambah dan daya saing industri;
3. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
5. Program dukungan dukungan manajemen.

Penajaman rancangan program utama pada RKA Kementerian Pertanian Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas.
Kegiatan ini tersebut di Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Karantina Pertanian. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,54 triliun.
2. Program nilai tambah dan daya saing industri.
Kegiatannya tersebar di Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, senilai Rp1,64 triliun.

3. Program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi akan dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian senilai Rp356,8 miliar.
4. Program pendidikan dan pelatihan vokasi, akan dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) senilai Rp770,3 miliar.
5. Program dukungan manajemen yang ada pada seluruh Eselon I dengan anggaran Rp5,14 triliun.

Pada Tahun 2022 Kementerian Pertanian menargetkan produksi komoditas utama, seperti padi sebesar 55,20 juta ton, jagung 20,10 juta ton, kedelai 0,20 juta ton, bawang merah 1,64 juta ton, cabai 2,87 juta ton, gula tebu 2,30 juta ton, dan daging sapi atau kerbau 0,44 juta ton. Dalam rangka mendukung pencapaian target produksi komoditas utama tersebut dan mendukung program pembangunan pertanian lainnya, Pagu Anggaran tahun 2022 sebesar Rp14,45 triliun tidak mengalami perubahan sesuai pembahasan Badan Anggaran. Pagu anggaran selengkapnya, baik untuk Pagu per program maupun Pagu menurut sumber dana disajikan pada bahan yang telah disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Dari Pagu anggaran tersebut telah dialokasikan ke 11 Eselon I kami, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal Rp1,66 triliun;
2. Inspektorat Jenderal Rp97,68 miliar;
3. Ditjen Tanaman Pangan Rp1,77 triliun;
4. Ditjen Hortikultura Rp1,04 triliun;
5. Ditjen Perkebunan Rp1,31 triliun;
6. Ditjen PKH Rp1,85 triliun;
7. Ditjen PSP Rp2,61 triliun;
8. Badan Litbang Pertanian Rp1,33 triliun;
9. BPPSDMP Rp1,09 triliun;
10. BKP Rp577,39 miliar; dan
11. Barantan Rp1,10 triliun.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Sebagai agenda selanjutnya ijinlah kami melaporkan tentang kegiatan antisipasi yang dilakukan Kementerian Pertanian terutama dalam mengantisipasi datangnya musim hujan. Data BMKG terbaru menginformasikan bahwa musim hujan diperkirakan lebih awal dibandingkan kondisi normal. Pada pertengahan September 2021 ini Pulau Sumatera diperkirakan sudah memasuki musim hujan, disusul bulan Oktober di sebagian Jawa dan Kalimantan. Bahkan pada bulan Januari 2022 diperkirakan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia akan berada pada puncak tertinggi. Curah hujan yang tinggi seringkali berdampak pada banjir dan bencana alam lainnya. Untuk itu, Kementerian Pertanian mengambil langkah antisipatif, diantaranya melalui:

1. *Mapping* wilayah rawan banjir;
2. *Early warning system* dan pemantauan rutin informasi iklim BMKG;
3. Penyiapan penyediaan bantuan benih;
4. penyiapan gerakan brigade Lanina;

5. Penyiapan pompanisasi in out dari sawah dan rehabilitasi jaringan tersier atau kuadter;
6. Sosialisasi dan penggunaan benih pada tahan genangan;
7. Sosialisasi asuransi pertanian AOTP dan penggunaan benih bagi yang Puso; dan
8. Penyiapan optimalisasi pasca panen dengan menggunakan pengeringan dan RMU.

Selain persiapan pengamanan pertanaman di lapangan, Kementerian Pertanian secara rutin juga memantau ketersediaan pangan pokok yang dilakukan secara periodik mingguan. Sampai dengan akhir minggu kedua September 2021 stok beras diperkirakan mencapai 7,62 juta ton, jagung 2,30 juta ton, cabai besar 16 ribu ton, cabe rawit 17 ribu ton, bawang merah 35 ribu ton, dan komoditas lainnya dalam kondisi surplus dan amat. Namun demikian, ada beberapa provinsi yang mengalami defisit untuk beberapa komoditas, seperti jagung, cabai besar, cabe rawit, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam.

Dalam rangka menjamin ketersediaan pangan merata di seluruh provinsi, Kementerian Pertanian telah menyiapkan stimulus bantuan transportasi pengiriman produk pertanian dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Selain itu, Kementerian Pertanian mengaktifkan Toko Tani Indonesia (TTI) di berbagai wilayah untuk membantu pemasaran produk pertanian yang dihasilkan oleh petani.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Pada kesempatan yang baik ini mohon ijin untuk menyampaikan terkait terbitnya Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, disingkat BRIN. Di mana tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit kerja yang melaksanakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan KL dialihkan menjadi tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN.

Merespon hal ini terkait dengan rancangan usulan transformasi Badan Litbang Pertanian ke BRIN dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. rencana usulan nama, Badan Standarisasi dan Sistem Pertanian (BSSP) disingkat;
2. Beberapa tugas dan fungsi BSSP diantaranya adalah mengakomodasi tugas dan fungsi Kementerian Pertanian dalam standarisasi produk pertanian dan pemanfaatan sistem pertanian termasuk didalamnya terkait perbenihan;
3. Berdasarkan Surat Menteri Pertanian Nomor 142/OT/020/M/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021 kepada Kepala BRIN dan Raker Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR RI, tanggal 25 Agustus 2021 Kementerian Pertanian mengusulkan bahwa untuk penelitian terapan masih tetap berada di Kementerian Pertanian. Sedangkan yang ditransformasi ke BRIN adalah penelitian dasar;

4. Badan Litbang Pertanian saat ini sedang dalam proses pemetaan SDM, aset program, kegiatan dan anggaran.

Selain itu, mohon ijin juga melaporkan terkait dengan meleburnya Badan Ketahanan Pangan kami BKP sebagai embrio terbentuknya Badan Pangan Nasional atau Bapanas, ada beberapa kegiatan yang selama ini dilakukan oleh BKP, seperti Pekarangan Pangan Lestari disingkat P2L, Toko Tani Indonesia, dan lumbung pangan masyarakat yang bersifat teknis di mana keberlanjutan yang masih diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Kami mengusulkan agar kegiatan-kegiatan tersebut masih tetap berada di Kementerian Pertanian untuk diintegrasikan pada Ditjen teknis yang relevan untuk menanganinya.

Terkait dua hal yang kami sampaikan tadi, kami mengharapkan dan mohon dukungan sepenuhnya dari Komisi IV DPR RI, serta dapat dipertimbangkan menjadi salah satu kesimpulan pada Raker hari ini.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan Rapat Kerja pada hari ini. Apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci saya mohon berkenan Pimpinan agar pejabat-pejabat Eselon I kami yang hadir dan terkait dapat diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tambahan.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI kami ucapkan terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamit Tharieq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya Pak Wamen.

Jadi perlu kita ketahui fungsinya Kementerian Pertanian akan hilang 3 kurang lebih. Litbang, kemudian Badan Ketahanan Pangan, Badan Karantina Nasional. Jadi sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, maka penyelenggaraan karantina harus terintegrasi. Selama inikan masih terpotong-potong ini. Saya juga bingung kalau nanti Kementerian Pertanian minta supaya jangan ada Badan Karantina Nasional. Dulu kami membahasnya pun dengan Kementerian Pertanian. Saya masih inget pada waktu itu, periode yang lalu kalau nggak salah itu.

Kemudian satu lagi, untuk Badan Karantina anggarannya tetap di Badan Karantina ya Pak Sekjen ya jangan dipindah-pindahkan lagi sesuai dengan rapat hari ini. Yang paling penting pertemuan Presiden Republik Indonesia dengan Menteri Pertanian, dengan Menteri Perdagangan, ada kesepakatan melaporkan bahwa kedua menteri tersebut mengatakan bahwa harga jagung akan menjadi Rp4.500.

Saya ingin minta penjelasan bagaimana caranya itu, karena data produksi jagung itu masih kacau. Kalau barangnya banyak yakinlah harganya

turun, kalau barangnya nggak ada yakinlah harganya akan naik. Ini *supply demand*-nya sudah pasti. Hari ini semua peternak kecil unggas nangis, biaya produksinya tinggi sekali, sementara mereka menjual telur dari produsen itu Rp14.000 sampai ke konsumen kurang lebih antara Rp18.000 sampai Rp19.000.

Tadi dibilang 20,1 juta ton produksi jagung da ada stok kurang lebih 2 juta lebih tadi ya, tadi sudah dicek ada di pengepul, di pengecer, di ini, saya nggak yakin itu ada. Jangan-jangan nanti, ini jangan-jangan nanti di gudang gudang yang pemilik jagung dipinjam dipaksa untuk jual. Tolong jangan ada dusta diantara kita, kasihan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sudah kerja keras, stres juga menangani covid kok tiba-tiba didatangi oleh peternak unggas. Harusnya kan nggak perlu sampai ke Presiden masalah ini, Presiden punya pembantu. Jadi jangan semua hal ke Presiden, harusnya kan cukup ada Menko Perekonomian, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, ini loh yang menjadi masalah.

Silakan Anggota yang akan mendalami, Pak Dedi pimpin.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, terima kasih Ketua.

Kita mulai hari ini, masih adakah yang akan menyampaikan pandangan. Dimulai dari Bapak tuanku Khalid, TA. Khalid. Silakan Pak.

F-GERINDRA (Ir. H. T. A. KHALID, M.M.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat para Ketua atau Pimpinan Komisi IV DPR RI, teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI, Pak Menteri yang diwakili Wamen, para Direktur Jenderal Eselon I dan teman-teman sekalian dari Pertanian.

Ijinkan mengingatkan waktu saya dari Fraksi Partai Gerindra mewakili teman-teman Fraksi Gerindra. Pak Dedi, ada 18 pertanyaan yang harus kami sampaikan. Namun, mengingat waktu saya juga mohon maaf sebelumnya sebentar lagi habis saya baca juga saya harus mohon pamit, karena ada rapat Fraksi. Maka ijin saya membacakan beberapa *item* saja, dari 18 pertanyaan ijin nanti serahkan dan saya mohon pamit Pak Ketua, karena ada rapat Fraksi.

Pertama, kami dari Fraksi Gerindra perlu mendapat pencerahan, perlu mendapat informasi secara konkrit, paska arahan Pak Presiden menyangkut jagung yang tadi telah disetujui di sampaikan juga oleh Pak Ketua. Bagaimana langkah-langkah kita dari Kementerian Pertanian mengantisipasi untuk melaksanakan arahan Presiden ini harga jagung untuk peternak. Itu satu.

Yang kedua, kami Fraksi Gerindra juga mempermasalahkan harga yang selalu dikeluhkan oleh petani maupun peternak. Sedangkan Kementan seharusnya sudah bisa memprediksi waktu-waktu tertentu saat harga akan jatuh sehingga ada langkah-langkah antisipasi. Karena dalam Undang-Undang Pangan sudah jelas bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan stabilitas pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen. Ini perlu juga penjelasan dari Kementerian Pertanian.

Kemudian ketiga, kami meminta Pemerintah berani mengambil langkah-langkah untuk melakukan perlindungan petani dengan menggunakan harga dasar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Yang pada Pasal 63 Ayat (1) menyebutkan Pemerintah Pusat menetapkan harga dasar hasil budidaya pertanian strategis nasional. Dan ditegaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, kemudian Pasal 25 Ayat (1) bahwa Pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani. Ini kita berharap ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

Kemudian terkait dengan kondisi, terkait dengan kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu salah satunya yang menyebabkan banjir, baru-baru ini juga kita mendapat informasi di Samarinda hampir satu Kecamatan lahan sawah padi tergenang banjir, sehingga petani meminta untuk dapat dibantu. Setelah ditelusuri ternyata ada beberapa hambatan saluran irigasi, sehingga air turun ke sawah. Oleh sebab itu, perlu koordinasi antar lintas Kementerian dalam hal dengan Kementerian PUPR. Ini saya pikir juga yang kita alami beberapa waktu lalu di berbagai daerah, termasuk di Aceh. Bukan cuma masalah jaringan irigasi tetapi juga ada hambatan-hambatan saluran. Ini kami minta dari Fraksi Gerindra agar Kementerian Pertanian segera dapat melakukan koordinasi yang konkrit dengan PUPR agar tidak korbannya petani.

Kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan yang selalu dibanggakan oleh Kementan, bahwa tiga kali ekspor. Kami meminta penjelasan produk atau komoditas apa saja yang diekspor selain perkebunan. Dan apa yang berdampak terhadap ekspor itu kepada petani.

Dan kemudian yang terakhir, mungkin dari sekian banyak seiring dengan Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, maka tugas Pemerintah di bidang pangan yang selama ini berserakan di beberapa kementerian lewat BPN diupayakan menjadi terintegrasi dalam satu lembaga. Fraksi Gerindra meminta penjelasan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian terkait operasional kebijakan strategi dan program kegiatan pembangunan pangan Badan Pangan Nasional, serta meminta kejelasan mengenai penyiapan lembaga organisasi kebutuhan sarana dan prasarana, sehingga indikator kinerja kelembagaannya.

Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan beberapa *item* dari 18 *item*. Ijinkan Pak Ketua, saya menyerahkan langsung karena saya juga harus meninggalkan ruangan ini sebentar, karena ada rapat Fraksi.

Terima kasih.

*Billahi Taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Dari Fraksi Gerindra kita geser ke sebelah kiri, menoleh sudut paling kiri Pak Suhardi Duka wajahnya sudah senyum.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua.*

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat, Pak Wamen, Sekjen, dan pejabat Eselon I, serta para Dirut.

Pak Presiden minta supaya harga jagung di kisaran Rp4.000 Memang antara kepentingan petani dengan peternak bisa pada titik ekuilibrium yang adil. Tapi namanya pasar ada hukumnya, ada kaidahnya, nggak ada normalnya. Tentu kalau ingin mengintervensi pasar ya siapkan Bulog untuk kasih turun jagungnya ke pasar bukan Kementerian Pertanian saya kira, karena Kementerian Pertanian tidak memegang stok jagung, kalau itupun ada jagungnya Bulog. Dan seberapa lama Bulog bisa mengintervensi pasar kalau dia punya hanya 1 juta ton jagung saya kira paling 3-4 bulan dia bisa intervensi pasar.

Olehnya itu, menurut saya kembali kepada kaidah hukum penawaran dan permintaan. Kalau ingin harga jagung tiba pada titik ekuilibrium dengan kepentingan peternak, maka dorong perluasan pertanaman jagung. Kalau tidak didorong perluasan pertanaman jagung supaya pemenuhan jagung dalam negeri bisa terpenuhi, maka tidak bisa harga pasti akan naik kalau permintaan lebih besar dari pada penawaran.

Alokasi anggaran yang dialokasikan saat ini memang saya lihat belum memberikan support besar kepada jagung. Kita pahami karena memang alokasi anggaran Kementerian Pertanian 3 tahun terakhir turun terus, dari 22, 18, 16 turun menjadi tinggal 14,5. Jadi saya kira Pak Presiden juga harus mempertimbangkan instruksinya dengan apa ya dengan alokasi anggaran di sektor yang kita harapkan bisa menopang pertanian di Indonesia ini.

Yang kedua, ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah anggaran di sektor pertanian ini sudah kita bicarakan dan sudah mulai fokus ya, hanya saja saya meminta kaji ulang kembali terhadap pengalokasian anggaran yang cukup besar untuk *food estate* Rp600 miliar. Saya minta kaji ulang kembali kalau emangnya masih ada kondisi yang masih diharapkan bisa dipacu utamanya tingkat produksi jagung, kedelai, dan padi. Terus terang indikator keberhasilan Kementerian Pertanian itu bila tidak ada impor beras. Apa pun suksesnya kalau impor beras itu tidak bisa menjadi indikator kesuksesan Kementerian Pertanian. Dan *alhamdulillah* 3 tahun terakhir kita

tidak pernah memberikan rekomendasi untuk impor beras, walaupun terjadi impor beras dengan berbagai alasan dan berbagai kepentingan yang lainnya. Tapi secara resmi antara Kementerian Pertanian dengan Komisi IV DPR RI tidak pernah merekomendasikan dan bahkan menolak untuk impor beras. Dan saya kira ini adalah titik kesuksesan dari teman di Kementerian Pertanian saat ini.

Olehnya itu, saya minta supaya di *Food Estate* itu katakanlah bisa kasih masuk jagung, supaya peningkatan produksi dari pada anggaran yang dialokasikan yang saya lihat saat ini, itu kurang memberikan dampak yang positif dalam rangka peningkatan produksi. Sekali lagi itu yang saya sampaikan.

Yang terakhir, saya minta bahwa apa yang kita komitmen kan itu dijaga dengan baik. Dan kalau Kementerian Pertanian komitmen saya kira Pimpinan lebih akan komitmen dan Anggota juga lebih akan komitmen terhadap apa yang menjadi keputusan kita. Prinsipnya saya dapat menyetujui atau Fraksi kami dapat menyetujui anggaran yang diajukan oleh Kementerian Pertanian untuk tahun 2022.

Terima kasih.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Tharieq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Pak Suhardi Duka yang sudah menyampaikan beberapa pokok pikirannya, diantaranya perluasan areal tanaman jagung dan komit terhadap apa yang disepakati kalau komit juga.

Selanjutnya kita geser nengok ke sebelah kanan, dari Nusa Tenggara Timur akan menyampaikan aspirasi Dapilnya seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mewakili PPK Nusa Tenggara Timur juga.

F-NasDem (JULIE SUTRISNO):

Siap, baik.

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati para Pimpinan dan segenap teman-teman di Komisi IV DPR RI,

Yang saya hormati juga Pak Wakil Menteri dan jajarannya.

Hari ini ijin saya untuk mewakili Fraksi Partai Nasdem, untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah Fraksi Partai Nasdem, mengapresiasi terpilihnya Indonesia menjadi Ketua G20 bidang pertanian yang diwakili oleh Bapak Menteri Pertanian pada *agricyulture minister meeting* G20. Kepercayaan dunia internasional tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia

memiliki komitmen dan mampu berperan aktif dalam mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan, serta mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri hingga tatanan global.

Yang berikutnya adalah Fraksi Partai Nasdem meminta Kementerian Pertanian untuk memberikan jawaban tertulis terhadap masukan dan aspirasi daerah yang belum mungkin belum kami terima, waktu pada saat Rapat Dengar Pendapat tanggal 7 dan tanggal 8 September yang lalu.

Yang ketiga adalah terkait harga pakan yang dikeluarkan oleh peternak agar menjadi perhatian serius Kementerian Pertanian. Fraksi Partai Nasdem berharap Kementerian Pertanian mempertimbangkan juga penyesuaian harga bahan baku sekunder atau komponen pembuatan pakan yang lain, sehingga menyesuaikan harga tidak menekan merugikan petani jagung. Fraksi Partai Nasdem mendorong lahirnya kebijakan yang bisa meringankan peternak dengan harga pakan yang terjangkau sekaligus tetap menjaga kesejahteraan petani jagung, karena di NTT jagung kemana-mana.

Keempat, terkait target produksi komoditas utama tahun anggaran 2022, Fraksi Partai Nasdem mendorong Kementerian Pertanian untuk memperhatikan data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok strategis nasional, di mana terdapat setidaknya empat komoditas yang pemenuhan kebutuhan melalui impor, yaitu kedelai, bawang putih, daging sapi, kerbau, atau gula pasir.

Fraksi Partai Nasdem mengharapkan ada upaya serius untuk terus meningkatkan target produksi dalam negeri 4 komunitas tersebut. Fraksi Partai Nasdem memahami, bahwa ketergantungan terhadap impor tidak bisa diakhiri seketika. Namun upaya tersebut harus dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mengoptimalkan peningkatan produksi dalam negeri, dalam menjamin ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan nasional.

Yang terakhir adalah Fraksi Partai NasDem mendorong penerapan *early warning system* terkait komoditas pertanian yang sering mengalami lonjakan harga, karena pasokan yang tidak stabil akibat perubahan musim, sehingga Kementan dapat mengantisipasinya melalui pemetaan dan percepatan distribusi komoditas dari daerah surplus ke daerah yang defisit saat perubahan musim kondisi cuaca tertentu.

Sebentar saya akan kasih lampiran juga dari aspirasi kami. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih.

Silakan Ibu disampaikan dilampirkan aspirasi dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semuanya Bu sampaikan setiap kabupaten kota. Kita geser sekarang ke Indonesia timur mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ibu Saadiah Uluputty mudah-mudahan nggak salah nyebut namanya.

F-PKS (Hj. SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Terima kasih Ketua.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, Pak Wamen Kementerian Pertanian beserta para Dirjen dan jajaran Kementerian Pertanian yang saya hormati.

Dari kami Fraksi PKS ada beberapa catatan, saya catat ada 11 poin yang akan kami sampaikan. Tetapi saya membacakan beberapa point yang akan di-*highlight*. Yang pertama, tentang Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tadi sudah di-*sounding* oleh Pak Ketua tadi, bahwa tiga fungsi Kementerian Pertanian itu akan hilang dari Komisi IV DPR RI, yang pertama Litbangnya, kemudian yang kedua Badan Ketahanan Pangannya, yang ketiga adalah Badan Karantina Nasional. Sementara kita membutuhkan penyediaan data neraca pangan nasional kita ini sampai ke level rumah tangga bila perlu. Dan perlunya agar kita bisa mengembangkan potensi pangan dan pengembangan pola konsumsi pangan masyarakat dan optimalisasi sumber daya lahan pekarangan untuk pengembangan pangan di tingkat rumah tangga. Maka kami juga mendorong program seperti program P2L itu agar ditingkatkan, ditambah mungkin volumenya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Yang kedua, soal di Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Pak. Kami harapkan ada data penyediaan bahan pakan untuk ternak sehubungan dengan peningkatan impor gandum untuk industri. Sementara jumlah *grand parent stock* kita mengakibatkan kelebihan *oversupply* ayam sebagaimana tadi disampaikan. Dan yang perlu kita memberikan perhatian sini adalah Pemerintah harus melakukan apakah importasi daging yang berasal dari negara yang tidak bebas penyakit eksotik saat impor daging didatangkan dari negara-negara, misalnya negara India. Untuk Direktur Jenderal Peternakan sendiri, saya punya satu catatan Pak Ketua, Pak Wamen saya minta agar kerbau Moa dan kambing Kisar dikembangkan sebagai plasma nutfah ternak nasional.

Secara khusus Menteri Pertanian telah mengeluarkan keputusan Nomor 2911 Tahun 2011, itu tanggal 17 Juli tahun 2011 yang menetapkan secara spesifik rumpun kerbau Moa di Maluku Barat Daya Pak Ketua. Ini kerbau Moa ini memiliki ciri dan spesifik yang tidak dimiliki oleh wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia Pak, badannya besar. Dan saya minta dapat perhatian yang sungguh-sungguh dengan mencanangkan program pengembangan

peternakan kerbau Moa di Maluku Barat Daya. Dan ini juga sebagai salah satu upaya untuk adanya konservasi plasma nutfah yang harus dilakukan agar populasi kerbau Moa terhindar dari kepunahan dan terpeliharanya kelestariannya. Dan olehnya itu, saya minta kita jadikan sebagai sumber ketahanan pangan nasional.

Yang terakhir Pak Ketua, di Dirjen Perkebunan. Saya minta catatan untuk tanaman pala dan cengkeh Pak, sebagaimana beberapa waktu kemarin saat rapat dengan Pak Menteri, saya minta agar sungguh-sungguh dan serius untuk bagaimana mengembalikan kejayaan rempah-rempah ini. Kemarin pada saat Bimtek dengan petani pala, mereka memberikan catatan soal sarana dan prasarana infrastruktur di lahan-lahan perkebunannya Pak. Jalan usaha tani di pusat-pusat produksi, kemudian juga bibit benih tanaman pala unggul, dan juga di hilirnya bagaimana teknologi pasca panennya. Pak Wamen dan Pak Sekken, mohon ini menjadi catatan yang juga bisa berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dan terutama masyarakat-masyarakat yang memang menaruh harapan yang besar agar nilai dari produktivitasnya ini juga bisa mempengaruhi kesejahteraan petani-petani kita yang ada di Indonesia bagian timur, khususnya bagaimana mengembalikan kejayaan pala cengkeh.

Yang penting juga adalah bagaimana berkoordinasi dengan Kementerian terkait agar ekspor pala langsung dari daerah penghasilnya Pak. Saya memberikan apresiasi yang besar kepada Menteri Pertanian di rapat kemarin, yaitu tentang Merdeka Ekspor. Kami dukung benar Merdeka Ekspor ini agar kita bisa memutus mata rantai para tengkulak-tengkulak yang bermain di jejaring mata rantai pasoknya, kemudian mata rantai ekspornya. Kita putus dengan menjadikan Merdeka Ekspor ini sebagai salah satu program di Kementerian Pertanian, melakukan ekspor langsung dari daerah penghasilnya agar harga ini juga bisa dinaikkan. Petani meminta, kami menyuarakan ini soal harga tanaman pala dan cengkeh ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat yang langsung ada di ujung tombak petani kita yang ada di masyarakat. Demikian Pak Ketua.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu yang sudah menyampaikan pokok-pokok pikirannya dan ingin memerdekakan para petani dari tengkulak, baik tengkulak lokal maupun tengkulak internasional yang mengatur hubungan dagang. Memang paling enak jadi tengkulak nggak usah nanam untungnya gede. Dan problem di Indonesia itu kan terjadi, menurut saya tidak selarasnya antara regulasi di Kementerian Pertanian yang punya produk dengan regulasi di Kementerian Perdagangan yang mengatur produk.

Kita pahami ketika produksi pertanian mengalami peningkatan, baik kedelai, jagung, maka dengan cepat harganya jatuh. Tetapi meleng sedikit Kementerian Pertanian termasuk sampai para petaninya, nanamnya kurang

dengan cepat harganya naik. Jadi memang di Indonesia ini selalu terjadi kebingungan, ketika pertanian mengalami peningkatan produksi maka terjadi penurunan harga secara tajam. Tetapi ketika sedikit saja pertanian kurang produksi maka dengan cepat harga ini naik. Dan ujung-ujungnya yang selalu di persalahkan adalah dunia pertanian. Ketika harga naik dunia pertanian yang ditanya, kenapa harganya naik? ketika harganya turun dunia pertanian ditanya juga, kenapa harganya turun? Mudah-mudahan lah segera Kepala Badan Ketahanan Nasional ini dilantik, Ketua Badan Nasional lupa Pak Ketua ingetnya pertahanan terus. Ketua Badan Pangan Nasional dilantik dengan segenap atributnya, sehingga bisa mengendalikan harga, baik harga tidak boleh terlalu melambung naik dan harga tidak boleh juga terlalu jatuh. Karena naik dan turunnya harga sesungguhnya tidak begitu memberikan efek pada dunia pertanian. Yang untung selalu adalah para pedagang, para tengkulak, dan bahasa tengkulak yang paling manis buat kita semua adalah para calo.

Terima kasih.

Selanjutnya ini kita geser lagi kita ke Kalimantan mewakili Fraksi Kebangkitan Bangsa Bapak Daniel Johan. *Mangga Pak.*

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kita hormati Pimpinan dan segenap Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang kita hormati Pak Wamen beserta seluruh jajaran.

Terima kasih Pak, kemarin sempat mampir dan me-*launching* petani muda berkemajuan.

Ada beberapa hal yang saya sampaikan, pertama tentu kita mengucapkan selamat karena Indonesia terpilih menjadi Ketua G20 di bidang pertanian, tetapi pada saat yang sama kita berharap ini menjadi kesempatan yang baik dan strategis juga dalam rangka membela kepentingan Indonesia. Ada dua hal yang sangat mendasar, misalkan meskipun banyak yang lain yang pertama adalah betapa negatifnya kampanye mengenai sawit, sehingga kita berharap keberadaan Pak Menteri di G20 sebagai ketua di bidang pertanian bisa memberikan informasi yang *fair*, yang *clear* justru Indonesia menjadi bagian jawaban untuk persoalan B100. Termasuk ratapan dari para peternak kita karena persoalan yang muncul saat ini mengenai peternak sebenarnya persoalan yang sudah sangat lama, apalagi kita sempat kalah di WTO dengan Brasil, sehingga keberadaan kita sebagai Ketua di bidang pertanian di G20 juga bisa ikut menyuarakan apa yang menjadi penderitaan, kesulitan para peternak kita.

Sehingga yang kedua adalah kita juga ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian bagaimana arahan dari Pak Presiden untuk menjawab harapan dan kesulitan-kesulitan yang selalu berulang dihadapi oleh peternak kita, karena bagi kami memang ada persoalan struktural yang harus dibongkar

mengapa kita menjadi sangat tidak efisien dibanding dengan Brasil misalkan. Sehingga langkah-langkah apa, langkah jangka pendek dan jangka panjang yang penting dilakukan oleh Kementerian untuk membantu para peternak sekaligus juga mendorong pertanian jagung, karena kedua hal ini menyangkut kedaulatan pangan kita.

Nah, yang kedua adalah dari sisi produksi kita cukup mengapresiasi Kementerian Pertanian cukup baik dan cukup memberikan kelegaan menjadi bagian yang kekuatan untuk ketahanan pangan kita, tetapi yang masih lemah adalah di pasca panen. Nah, kita minta Kementerian Pertanian benar-benar bisa berkoordinasi, bekerja sama, benar-benar memanfaatkan BumDes. Karena kemarin saya juga baru meresmikan BumDes ya, karena gini tidak ada cara yang lebih efektif kita meningkatkan kesejahteraan petani selain ya secara teknologi meningkatkan produktivitas, tetapi juga kita harus memperkuat petani menguasai hilir. Nah, BumDes-BumDes ini menjadi bagian kekuatan dalam rangka pengorganisasian petani menguasai hilir. Tidak lagi yang paling simpel tidak lagi menjual gabah kering, tetapi bagaimana petani melalui Bumdes dia sudah bisa menghasilkan, itu tengkulak akan terpotong banyak, akan bisa menghasilkan beras dengan kemasan yang baik. Sehingga Bumdes-bumdes yang ada, yang sudah berjalan itu bisa di-*support* minimal dalam konteks membuat kemasan yang baik, karena mereka kan juga mengalami kesulitan, sehingga harus ada *pilot project* BumDes itu harus berhasil.

Yang terakhir ini Pak Wamen khususnya Pak Kasdi ini, kita dulu pernah berjuang bersama sekian tahun yang lalu tetapi sampai sekarang belum berhasil. Mohon selamatkan para petani kratom, kratom ini nilai ekspornya itu Rp50 triliun lebih per tahun. Amerika saja itu membutuhkan 133 ribu ton, kenapa keraton menjadi penting? Yang pertama adalah dibandingkan dengan sawit sekali pun termasuk karet, kita kalau karet itu 1 hektar paling hasilnya hanya Rp3 juta per bulan, sawit sekitar Rp6 juta per bulan tapi dipotong-potong pupuk dan segala macam kurang lebih Rp3,5 juta per bulan. Kratom itu tidak perlu pupuk Pak, nggak perlu ada penanaman kembali setelah 25 tahun, karena dia memang tanaman hutan. Kratom itu 1 hektar itu menghasilkan Rp66 juta per bulan per hektar, bayangin jauh sekali. Sementara akan ada keputusan pelarangan itu sekitar tahun 2022 paling akhir tahun 2023. Pada saat yang sama bulan lalu Thailand malah melegalkan, sehingga posisi kita melarang itu akan sangat menguntungkan Thailand dan merugikan petani kita.

Jadi jangan memberangus potensi ekspor Rp55 triliun per tahun ini. Buat saya itu adalah harta untuk Indonesia, sehingga saya mendorong segera Menteri Pertanian melakukan Rakor, Rakor seluruh *stakeholder* Kementerian Pertanian, BNN diundang, para pihak terkait, para peneliti LIPI, para ahli, karantina, sehingga setidaknya jangan ada keluar keputusan sebelum adanya penelitian yang matang dan final mengenai kratom, yang menjadi dasar yang kuat untuk dilahirkan kebijakan. Minimal kita tunda entah 10 tahun, entah apa tapi sambil penelitian itu 1-2 tahun ini cepat, sehingga kita bisa menghasilkan kebijakan yang tidak memberangus hartanya kita sendiri. Sekarang kita kratom kita larang tahu-tahu yang kita impor adalah produk hilirnya obat-obatan. Justru yang harus kita dorong adalah kita tidak hanya menjual kratomnya kalau bisa

industri kita bangun di sini. Jadi salah satu tempatkan kratom sebagai hal yang strategis.

Demikian Pak Wamen, Pak Sekjen, saya nunggu kita komunikasi agar Rakor itu segera. Kita juga berharap dapat *support* dari Pimpinan, untuk menjadi bagian menyelamatkan harta Indonesia ini.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

FRAKSI PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih Pak Daniel.

Kratom ini masih dianggap oleh BNN sebagai narkoba, mungkin nanti Rakornya BNN, Kepolisian, Kementerian Kesehatan, ya itu domainnya Pemerintah.

Saya mengoreksi dikit Pak Daniel, Menteri Pertanian itu bukan terpilih menjadi Ketua Bidang Pertanian, tapi karena Indonesia menjadi Presiden G20 otomatis bukan terpilih, jangan dibalik-balik jangan salah ini. Betul nggak Pak Sekjen? Betul.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Saya tahu, biar Pak Ketua menjelaskan lebih detail.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Begitu Indonesia menjadi Presiden G20 otomatis, jadi jangan dibilang terpilih. Inikan yang ngomong staf khususnya melalui media, itukan nggak benar. Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian menjadi tuan rumah nanti pada Kementerian Pertanian, bukan terpilih jangan balik-balik.

Silakan Pak Dedi lanjut.

KETUA RAPAT:

Baik Pak Ketua.

Ruangan ini terasa tidak hangat kalau Ketuanya tidak di sini, jadi dingin lagi. Selanjutnya di persilakan ke sebelah timur lagi, daerah lumbung padi, Subang, Majalengka, Sumedang, mewakili Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, para Anggota Komisi IV DPR RI, Pak Wamen beserta jajaran, dan para Dirut BUMN bidang pertanian.

Saya mewakili Fraksi PDIP Perjuangan, Pak Wamen topik Rapat Kerja hari ini adalah masalah Renja dan Anggaran 2022. Kementerian Pertanian mengacu pada penyusunan Renja dan Anggaran ini pada prioritas program nomor 3 dan nomor 4, terkait pada ketersediaan pangan dan peningkatan lapangan nilai tambah, serta lapangan pekerjaan. Kita akan lihat kayak apa Renjanya, tentunya bukan hanya itu 2021 2 tahun berjalan bahwa bidang pertanian diwarnai oleh ketidakseimbangan dengan kepentingan produsen dan konsumen. Bahkan di 2021 meluas Pajale, padi, gabah, masih pada posisi harga yang terendah. Kemudian jagung tadi sudah dibicarakan apalagi Pajale. Kemudian di wilayah saya ada yang bakar lahan cabai, tadi juga disinggung masalah ayam, masalah harga telur ayam, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, yang ketiga juga harus menjadi perhatian Kementerian Pertanian, arahan Pak Presiden pada apa namanya rapat kabinet, bahwa para pembantu Presiden dalam menyusun rencana kerja harus berorientasi bahwa ini dalam kondisi kritis, tidak normal. Oleh karena itu, saya mencoba membuka tentang masalah alokasi anggaran. Pada posisi anggaran menurun hanya Rp14 triliun ini yang mengejutkan adalah Dirjen Tanaman Pangan yang tadinya 2012 Rp3, 9 triliun sekarang hanya teralokasikan Rp1,7 triliun. Direktorat Jenderal Hortikultura yang paling mengejutkan Rp600 miliar sekarang Rp1 triliun lebih. Ditjen Perkebunan kemarin hanya Rp1 triliun sekarang Rp1,3 triliun hampir Rp1,4 triliun. Oleh karena itu, saya juga ucapan terima kasih *support* langkah Ditjen Tanaman Pangan, sekalipun anggaran Rp1,7 triliun tapi produksi padi gabah padinya meningkat 1 juta ton. Jadi dari 54 juta ton menjadi 55 juta ton.

Orientasi program kegiatan di 2022 direncanakan berorientasi bagaimana membangun pangan yang ramah lingkungan dengan nilai yang tambah yang tinggi tentunya. Ini sejalan dengan apa namanya prioritas 3 dan prioritas 4. Hanya persoalannya di situ juga masih ada bibit Pak Ditjen Tanaman Pangan. Bibit-bibit yang tersalurkan ke masyarakat itu mayoritas tidak diminati, sehingga banyak bibit yang tidak termanfaatkan. Sebut saja jagung dan dikehendaki apa namanya NP21 Bapak berikan 89 itu, begitu juga bibit padi kalau sudah direndam di air sudah banyak apa namanya terangkat ke atas berarti itu tidak produktif. Salah satu peningkatan produksi tentunya adalah bibit yang baik, sekalipun peningkatan bantuan bibit dari 2 juta sekarang hanya 693 ribu ton, yang diinginkan oleh petani saatnya perlu di pasaran ada. Apa lagi tadi disampaikan musim tanam akan lebih cepat karena juga musim hujan di Oktober sudah dimulai. Ini persoalan dari tahun ke tahun, ada pada posisi MT 1, MT 1 2 tahun bersentuhan. Di sini petani sulit mendapatkan bibit, di sini juga petani sulit mendapatkan pupuk. Oleh karena itu, mohon karena Kementerian pun juga sudah memprediksikan musim tanam akan lebih awal, bahwa apa yang diperlukan sarana prasarana produksi akan siap di lapangan.

Kemudian Ditjen Hortikultura, begitu besar peningkatan anggaran Rp400 miliar di 2022. Oleh karena itu, perlu di sampaikan kepada masyarakat ternyata programnya kampung, kampung, kampung, kampung buah, kampung pisang, kampung jahe, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan permasalahan petani adalah petani itu tidak bisa dengan baik menyalurkan ke pasar, hasil produksinya tidak terserap ke pasar. Dari aktivitas rencana kerja

yang ada tidak terbaca bagaimana Kementerian Pertanian membantu petani agar hasil produksinya terserap oleh pasar. Kalau kita perhatikan pada posisi apa namanya stok pangan strategis seolah-olah di tahun 2001 bulan September ini, seolah-olah kita tidak punya permasalahan. Jagung ada 2 juta lebih, harga pun juga bagus, begitu juga yang lainnya. Mohon data ini dilengkapi stok pangan strategis di 2021 posisi September itu, itu pasokannya dari mana? Apakah itu pasokan dalam negeri atau juga ada patokan luar negeri. Kita bisa menghitung kenapa sekarang pasokannya juga apa namanya banyak, wajar kalau harga menurun, tapi kan harganya meningkat. Jagung pasokannya ada, cukup dua juta lebih sekarang lagi musim panen lagi, tapi harga terus menaik, ini ada persoalan apa? manakala Kementerian tidak memecahkan persoalan itu programnya pasti hanya *copy paste*. Apa yang terjadi kemarin terjadi juga saat ini.

Kemudian di Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari tahun ke tahun anggaran mengalir begitu besar, anggarannya untuk menambah populasi. Artinya apa? sekalipun banyak dipotong untuk menjadi daging mestinya stok daging cukup, tapi kenyataannya impor daging terus-menerus meningkat. Dampaknya adalah petani ternak ayam tergeser oleh apa namanya pasar, krena impor dagingnya terus menerus. Padahal di masyarakat hajatan apa pun lebih banyak menggunakan daging ayam dari pada daging sapi atau daging kerbau, tapi karena impor tidak terkendali maka petani ayam tergeser. Mestinya Kementerian Pertanian mengendalikan impor-impor pangan ini untuk kepentingan menjaga, melindungi kepentingan petani kita.

Kemudian Pak Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Bapak mempunyai program tipe 400, ini paling berat di MT 3 ini karena kesulitan air. Untuk mengungkit pendapatan nilai tambah bagi petani, untungnya bagus, bisa lebih besar dari pada untung menanam padi, tolong bibit kacang hijau dibesarkan. Itu saya hitung-hitung bisa 1 hektar dapat untung Rp17,5 juta itu Pak, karena dari 100 tumbak itu 1 per 7 hektar itu bisa untung Rp2,5 juta tidak memberikan pupuk, tidak memelihara, begitu panen padi langsung diawur kacang hijaunya. Ini bisa menjadi sumber untuk ekspor kacang hijau, jadi bukan hanya 3.000 mohon untuk dilebihkan agar tidak terbangun lahan-lahan yang tidak termanfaatkan.

Skira itu Pak Pimpinan, mohon untuk diperhatikan agar rakyat ini terobati, rakyat menantikan bagaimana realisasi dari pada anggaran tahun 2022 ini.

Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Selanjutnya kita, saya mengingatkan saja dulu banyak petani yang lahir sendiri memproduksi porang, kemudian menjadi orang-orang sukses anak-anak muda. Terus kemudian biasanya Pemerintah dengan cepat merespon, kemudian mempublikasikan, dan setelah itu lahirlah gagasan tanaman porang

di mana-mana. Saya mengingatkan saja jangan euforia porang berdampak membunuh petani yang sejak awal dia konsisten tanpa bantuan Pemerintah menjadi orang-orang hebat. Kemudian dibangun porang-porang di berbagai tempat. Saya yakin kalau jumlah produksinya terlalu tinggi harganya akan jatuh, apalagi kita jualnya bahannya bahan baku bukan bahan jadi.

Mohonlah kegiatan porang itu dievaluasi, kebutuhan ekspornya berapa, jangan kita dorong lagi bikin tanaman di berbagai tempat yang pada akhirnya melahirkan kebangkrutan bagi dunia pertanian, khususnya mereka yang berjasa lebih awal menanam porang. Dan untuk menyambut hal ini apakah di Garut akan di tanam porang atau tidak, dipersilahkan Pak Haerudin yang mewakili masyarakat Garut, yang dititipkan di Fraksi Amanat Nasional.

Terima kasih.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan yang saya hormati,
 Anggota yang saya hormati,
 Pak Wamen beserta seluruh Eselon I Kementerian Pertanian yang saya hormati,
 Mitra baik dari baik Pupuk Indonesia Holding Company, baik Berdikari, Sang Hyang Seri, Pertani yang juga hadir pada hari ini,
 Dan seluruh yang hadir yang saya cintai dan saya hormati.

Pimpinan, ingin kami sampaikan Pak Wamen, pertama mengingatkan apa yang disampaikan oleh Pimpinan. Jangan membuat kebijakan yang membuat petani kita malah jadi tidak berdaya gara-gara kebijakan. Banyak petani kita itu mandiri tapi setelah ada kebijakan malah petani kita yang jadi masalah, petani kita masalahnya jadi bangkrut. Contoh hari ini porang yang terbaru isunya sama dan dulu cengkeh, dan itu keterlibatan Pemerintah semua. Saya ingin berikan peringatan dari hari ini, kenapa begitu? Karena di internal di ruang kebijakan itu ada seseorang, ada sekelompok, ada sekelompok mafia yang berharap keuntungan dengan cara mudah. Nah, itu hati-hati Pemerintah Pak Wamen. Bukan tanpa alasan kenapa setelah Pemerintah terlibat malah jadi bangkrut petani itu, karena di ruang kebijakan itu ada sekelompok orang yang memburu rente dengan cara yang mudah dan menggunakan kekuasaan. Ini yang harus diingatkan oleh kita semua.

Yang kedua Pak Wamen, di ruang kita memang kita ini sangat sedih kalau kita berbicara dari tadi masalah impor, karena kewenangan kita yang terbatas dihadapkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja kita ini. Jadi kalau kita mengatur ritme impor sesuai dengan apa yang di butuhkan, bukan apa yang diinginkan. Impor sekarang itu apa pun yang diinginkan oleh siapapun yang sedang berkuasa kira-kira begitu, bukan apa yang kita butuhkan. Tapi paling tidak secara moral kita itu menyuarakan bahwa petani kita tidak butuh impor a, b, c, d, walaupun hari ini impor. Paling tidak itu muncul ke permukaan sebagai bentuk perlawanan kita terhadap ketidakadilan dari sebuah kebijakan

atau sebuah kebijakan politik yang akan merugikan para petani kita. Itu yang kedua.

Yang ketiga Pak Wamen, ruang pertanian kita itu sekarang memang kondisinya dari sisi anggaran menurun. Produktivitas kita naik ini memang keseretakan para petani kita juga punya berpihak kepada persoalan bagaimana dia punya daya tahan. Saya pikir program-program yang hari ini yang sangat strategis, yang banyak melibatkan banyak orang yang sifatnya kepadatkaryaan itu adalah bagian pencaanangan kita, apalagi tadi di bidang pangan, karena pangan itu adalah pertahanan kita, hidup matinya negara kita, hidup matinya bangsa kita.

Yang terakhir, kita ingin menyoal Pak Pimpinan, ketidak hadirannya 4 Dirjen ini dan Pak Menteri, tentu bagi sebuah suasana kebatinan dan psikologi politik kita ini terganggu. Secara normatif oke nggak ada masalah, tapi psikologi politik kita terganggu, karena ada ruang yang di mana kita satu saat ada martabat yang direndahkan. Komisi IV DPR RI ini mewakili DPR kolektif kolegial yang sebagai lembaga tinggi negara, Presiden sebagai lembaga tinggi negara, menteri pembantu Presiden, itu yang dibedakan, Menteri pembantu Presiden, Komisi IV DPR RI adalah DPR kolektif kolegial, dan hadir atas nama Presiden. Oke, menurut MD3 boleh Pak Wamen karena statusnya Menteri dan Wamen sama, tapi secara psikologi politik ini akan menjadi masalah ke depan. Dan saya ingin ingatkan dari hari ini saran normative itu *its oke* dan tidak ada masalah tapi kemitraan kita akan terganggu secara psikologi politik.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Mudah-mudahan ke depan tidak lagi perbenturan jadwal di luar negeri dengan acara Rapat Kerja, sehingga tidak ada psikologi yang terganggu apalagi psikologi politik, karena kesetaraannya jelas. Kalau Menteri pembantu Presiden, kalau DPR setara dengan Presiden, tapi kalau honor DPR muncul menjadi masalah, padahal kalau kita bandingkan antara Anggota DPR dengan Dirjen saja sudah jauh tingkatannya.

Silakan Pak Ichsan Firdaus yang biasa ngitung honor Dirjen, gaji Dirjen dengan gaji DPR.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag., M.H.):

Pimpinan, sebentar interupsi dulu.

Yang honor yang keluar itu butuh diklarifikasi ya karena ini terbuka, publik ini yang langsung nyambung ke ruang publik pembicaraan yang barusan. Khawatir dianggap serius yang oleh salah satu Anggota DPR RI yang diwawancarai tentang honor kita itu adalah bukan hak kita yang disampaikan itu, bukan milik kita, tapi yang kita hanya sebagai jembatan untuk jalan kita.

Nah, tadi karena Pimpinan menyoal itu khawatir diresponnya seolah-olah itu benar milik kita khawatir itu responnya.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, betul kita paham aspirasi bukan milik kita, uangnya kan dibagikan. Santai saja Pak Ichsan silakan jelasin.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mungkin kalau Pak Haerudin menyampaikan karena klarifikasi pada publik, mungkin juga kepada keluarganya juga mungkin.

Pak Wamen, para Eselon I, dan Dirut BUMN yang saya hormati.

Saya minta terkait dengan keseimbangan anggaran Pak Wamen, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sutrisno tapi saya ingin menyampaikan secara detail ini ada angkanya Pak. Mungkin bisa diperbesar kurang besar, Mas tolong dibesarin dulu. Saya ingin ingin ngasih tahu saja Pak Wamen terkait dengan keseimbangan anggaran, bisa dibesarkan. Saya ingi sebutkan saja kalau kita bandingkan antara pagu 2020 dengan tahun 2022 itu ada kemiripan. Ada kemiripan tapi walaupun ini turun tapi saya hanya ingin mengingatkan sama Pak Wamen untuk disampaikan ke jajaran Kementerian Pertanian, bahwa Rp14,5 triliun ini saya minta dengan sangat ini cukup sampai tahun ini saja. *Bottom line* kita memang di 14,5 kalau sampai turun lagi di angka 12 habislah Kementerian ini. Saya minta ini betul-betul menjadi *Bottom line* kita lah 14,5 ini sudah betul-betul parah menurut saya, karena bagaimana pun biasanya kita diangka 18 sampai 22, tapi 14,5 ini sudah agak *bottom line*. Tolong pertahankan angka ini, pertahankan dalam arti jangan sampai turun lagi, tapi baiknya naik. Nanti kita lihat perkembangannya dan saya minta kepada jajaran Kementerian Pertanian ini untuk bagaimana cara menyakinkan para *stakeholder* yang lain di pemerintahan untuk menambah alokasi anggaran. Terutama tadi sudah disampaikan oleh teman-teman terkait dengan bagaimana harga jagung yang begitu tinggi. Ini juga kita harus antisipasi.

Pak Wamen yang saya hormati dan Bapak-Ibu semua.

KETUA RAPAT:

Pak Ichsan saya tanya mohon maaf, jagung itu di Tanaman Pangan atau di Hortikultura.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Di Tanaman Pangan, jagung pakan itu kalau pangan itu di Horti kalau jagung manis ya.

Nah, saya ingin menyoroti saja secara presentasi yang saya ingin soroti itu ada tiga yang saya marahin, dua yang ada satu pun tanaman pangan itu biasanya atau di tahun 2020 itu 30% dari total anggaran, tapi tahun ini itu 12,17%, jadi sepertiganya. Pak Trisno mohon maaf, tadi Pak Trisno sudah menyampaikan tapi saya ingin menyampaikan data ini. Nah, maksud saya ini dan Dirjen Hortikultura dan Dirjen Peternakan dan kesehatan hewan ini. Ini maksud saya kita perlu merasionalkan juga angka ini sehingga Pagu yang ada itu betul-betul seimbang, sesuai dengan target produksi yang sudah disampaikan Pak Menteri sejak dari penyampaian Pagu Indikatif. Pagu Indikatif tahun 2022 itu pada saat bulan Juli itu tidak ada perbedaan yang signifikan visi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dengan produksi yang ada, tetapi anggarannya jomplang.

Saya minta ini sebenarnya Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat kemarin sudah menyampaikan, bahwa kita perlu ada keseimbangan anggaran. Makanya kemudian di dalam Rapat Kerja hari ini saya minta kepada jajaran Kementerian Pertanian untuk menyeimbangkan anggaran secara proporsional kembali, jangan jomplang seperti ini. Terutama Dirjen Tanaman Pangan dan di beberapa Dirjen yang lain. Karena bagaimanapun kalau kita bicara pertanian kita juga harus bicara ada namanya Pajale itu pangan itu kan Pajale (Padi, Jagung, dan Kedelai). Nah, kalau kemudian anggarannya 12,17% dari secara proporsional Rp14,5 triliun ini akan muncul permasalahan di kemudian hari. Bahwa kemudian nanti kita perkuat dari sisi infrastrukturnya, kita perkuat dari sisi apa namanya budidayanya, itu sudah kita sampaikan pada saat Raker dan RDP kemarin. Maka kemudian di dalam kesempatan hari ini saya minta tolong atas nama Fraksi Partai Golkar, bukan minta tolong tapi mendesak kepada Kementerian Pertanian untuk memberikan keseimbangan anggaran lagi. Jangan yang seperti disampaikan di dalam bahan yang sekarang ini. Saya minta ini kemudian kita rubah dengan baik secara proporsional, sehingga apa namanya ada daya dorong bagi peningkatan produksi pangan nasional. Itu yang pertama.

Yang kedua, sudah disampaikan tadi berulang-ulang oleh Pak Ketua kemudian Pak Wamen juga di dalam pengantarnya. Perlu kita mengantisipasi terkait dengan penerapan 2 Undang-Undang dan 1 Perpres. Pertama adalah Undang-Undang 21 Tahun 2019 terkait dengan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Di dalam Undang-Undang tersebut sudah di amanahkan bahwa karantina itu menjadi satu badan. Dan ini praktis akan dilepas oleh Kementerian Pertanian, karena ini amanah Undang-Undang 21 Tahun 2019. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 terkait dengan Badan Pangan Nasional. Nah, hal yang seperti ini juga pasti dilepas terutama di Badan Ketahanan Pangan ini pasti lepas. Kemudian ada Perpres Nomor 33 Tahun 2001 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan ini akan merubah mekanisme kerja, merubah struktur kepegawaian, merubah struktur organisasi, dan kemudian merubah banyak hal.

Saya ingin menyarankan kepada Kementerian Pertanian untuk kemudian secara serius melakukan reorganisasi ini Pak. Nanti tahun 2022 pasti menurut Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan kan selambat-lambatnya tahun 2022 kalau tidak salah Pak Kasdi ya Pak Sekjen, selambat-lambatnya 2 tahun itu mesti di bentuk. Makanya kemudian saya berharap Kementerian Pertanian melakukan reorganisasi, tidak hanya sekedar anggaran. Anggaran saya juga setuju tadi sudah sampaikan sama Pak Wamen temen Pak Ketua juga, ada beberapa anggaran yang memang harus kita selamatkan. Jangan sampai ini dibawa di-*carry over* oleh apa namanya oleh institusi yang baru.

Khusus untuk karantina memang kita perlu perkuat, karena bagaimanapun karantina ikan itu ada di Kementerian Kelautan Perikanan, dari Kementerian Kehutanan juga ada, Kementerian Pertanian juga ada. Nah, makanya kemudian sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Kementerian Pertanian dari struktur anggaran yang saya cantumkan ini yang kita lihat seperti ini, itu perlu melakukan reorganisasi dan realokasi terkait dengan keberadaan 3 peraturan perundang-undangan ini, 2 Undang-Undang dan 1 Perpres. Dan ini secara serius, saya yakin ada beberapa pegawai juga yang tidak mau di-*over* ke BRIN misalnya, saya yakin juga ada. Juga ada teman-teman yang di BKP yang tidak mau juga pindah ke Badan Pangan atau bahkan ada yang ramai-ramai untuk ke Badan Pangan.

Ini perlu secara serius Pak, karena bagaimana pun Perpres terkait dengan Badan Pangan itu sudah keluar. Jangan-jangan Pak Wamen saja yang Kepala Badan Pangan Pak, jadi *carry over* saja sekalian Pak, dari teman-teman yang ada. Saya nggak tahu juga mungkin Pak Wamen yang jadi Kepala Badan Pangan, sekalian naik jabatan gitu Pak, maksudnya. Artinya kita perlu *carry over* Pak, perlu mengantisipasi *carry over* itu. Mengantisipasi tidak hanya sekedar anggaran, kalau anggaran ya saya setuju tapi reorganisasi Kementerian Pertanian. Badan Standardisasi Pertanian itu salah satu solusi, tapi harus ada solusi lain BKP ini mau diapakan. Kalau BKP di-*carry over* semuanya apakah pegawai juga mau di-*carry over*, apakah kemudian nanti di karantina apakah semua karantina inikan ada PPNS juga Pak, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Karantina, ini harus satu badan juga.

Jadi reorganisasi ini penting Pak, saya minta kalau bisa itu Pak Ketua, ijin kita diskusikan sama-sama, kalau memang harus ada FGD kita FGD-kan juga. Artinya ini akan satu kesatuan pandangan antara Komisi IV DPR RI dengan mitra kerja dalam hal ini Kementerian Pertanian. Kalau ada FGD 3 Pak, BRIN misalnya seperti apa desain Litbang, kemudian Karantina seperti apa desainnya, kemudian BKP itu seperti apa desainnya. Sebenarnya sudah ada tetapi harus kita antisipasi bagaimana operasional, tingkat operasional di lapangan sehingga betul-betul Kementerian Pertanian itu apa namanya mohon maaf Pak Ketua, Kementerian Pertanian itu betul-betul fokus pada produksi. Kan itu sebenarnya tujuan dari keluarnya Badan Ketahanan Pangan, keluarnya Litbang, keluarnya itu, sebenarnya Kementerian Pertanian ditugaskan hanya untuk produksi bukan hal yang lain.

Yang terakhir Pak Ketua, jagung. Pada saat RDP kemarin kita sudah memberikan rekomendasi kepada, membuat kesimpulan bahwa kita harus mengantisipasi terkait dengan jagung terutama konversi jagung ke gandum Pak. Kemarin di dalam RDP sudah kita sampaikan, sudah kita simpulkan, bahwa perlu ada perbedaan gandum untuk *food* dengan gandum dengan untuk *feed*, gandum untuk pangan dan gandum untuk pakan. Ini harus betul-betul di-*clear*-kan, jangan sampai harga jagung naik maka solusinya adalah gandum. Nah, gandumnya ini di lapangan kemudian tidak susah membedakan antara pangan dan pakan seperti apa. Saya minta segera harga Rp6.000 jagung hari ini harganya Rp6.000 itu sangat tinggi dari HPP sekitar Rp3.750. Sekarang jagung sudah Rp6.000 itu, itu yang menjerit peternak Pak, kalau petani jagungnya senang harganya tapi peternaknya, ini perlu jaga keseimbangan, perlu diantisipasi bawa harga jagung itu betul-betul layak untuk peternak dan untuk juga petani jagung.

Ini peternak sudah saya barusan baca di salah satu media *online* ada bantuan dari Presiden untuk memberikan bantuan jagung kepada peternak di Blitar itu. Tapi kalau itu hanya satu saja Pak, peternak inikan banyak maka perluantisipasi. Apakah solusinya adalah gandum, ya saya tidak tahu. Karena gandum ini tidak pernah dikontrol oleh Pemerintah, ini masukkan saja sesuai dengan kebutuhan. Dan di lapangan tidak bisa membedakan mana *food*, mana *feed* untuk gandum. Itu saja Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Terima kasih Pak Ichsan.

Mengenai kelembagaan pada waktu yang lalu kita juga sudah menyampaikan. Di Indonesia itukan suka rebutan istilah, sudah saya bilang di Litbang ganti menjadi Badan Perbenihan Nasional, nanti ada direktur perbenihan jagung, direktur perbenihan padi, terus berbagai benih direktur, holtikultura apa itu. Ini bisa dibuat dengan seperti itu dan ini harus cepat, karena Pak Ichsan tadi menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian harus diselamatkan dan satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan adalah Dokter Hewan Slamet.

Silakan pendalaman.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan, Pak Ketua, Ibu Ketua, rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Pak Wakil Menteri serta dengan seluruh Eselon I dan jajarannya yang saya hormati.

Pertama, karena ini juga kaitanya dengan Raker anggaran. Secara prinsip Pak Ketua, dan Sekjen, beserta jajaran, saya menerima seluruh ajuan anggaran yang disampaikan oleh Kementerian dengan catatan bahwa seluruh anggaran yang berpihak kepada masyarakat dalam hal ini adalah para petani tidak diganggu gugat. Ini catatan kita seperti itu dan saya yakin Kementrian akan komitmen dengan itu.

Yang kedua, saya sedikit menyinggung Pak Wamen, sama dengan tadi Pak Ichsan terkait dengan jagung. Jadi saya menyoroti sedikit begitu cepatnya kemudian Presiden menginstruksikan untuk segera turun, turun jagung harganya maksudnya, ini harus dijaga keseimbangan. Sisi lain kita perlu memperhatikan peternak, memang betul bahwa pakan itu saya juga pelaku ada 60% itu menjadi unsur dari HPP itu. Kalau begitu naik sedikit pakan maka tidak hanya sekedar menggerus keuntungan kalau itu berkepanjangan akan menjadi gulung tikar dari peternak itu. Tetapi sisi lain kita juga perlu memperhatikan nasib petani dari petani jagung. Oleh karena itu, saya pikir tindakan yang dilakukan tidak bisa seperti itu instan kemudian turunkan, tapi harus ada langkah-langkah yang terprogram, terstruktur sehingga *policy* nanti ke depan akan menjadi sebuah hal yang baik.

Oleh karena itu, saya ingin nanti mendapatkan gambaran apa sih yang kemudian akan dilakukan untuk menyeimbangkan itu. Pakan ternak tidak tinggi dalam artian terjangkau, kemudian petani jagung ter-cover. Karena saya melihat bahwa manajemen pakan atau apa ini yang jelas ada kartelisasi. Bagaimana kemudian memang KPPU menemukan hal ini, tetapi memang tidak ada ketegasan dari dari KPPU bahkan juga dari Pemerintah sendiri. Oleh karena itu, saya pikir Kementan untuk menelusuri ini dari sisi kartelisasi ini juga. Jadi ini kayak buang angin, kayak angin faktanya ada susah dilihat, susah dirasakan, karena memang saling menutupi, sehingga kartelisasi ini yang harus diselesaikan dulu oleh Pemerintah baru kita akan bisa mengontrol tentang harga pakan, harga jagung, dan lain-lain. Itu mungkin Pimpinan, yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Saya mau tanya sebenarnya Pak Wamen atau Pak Wandu mungkin ya, atau siapa yang bisa jawab. Sebenarnya kita punya stok jagung itu cukup apa nggak untuk makanan ternak. Jawab langsung nggak apa-apa ya, sekarang saja saya nanya.

DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI (Dr. Ir. SUWANDI, M.Si.):

Cukup Ibu, prognosa kami produksinya 18 ribu ke 18 juta ton, kadar air 14, kemudian kebutuhannya 16 juta ton. Nah, sebarannya stok seperti slide yang ditayangkan tadi slide 11 tentang sebaran stok, itu ada di GPMT itu 722 ribu ton, kemudian ada di pengepul 744 ribu ton, di agen 423 ribu ton, usaha lain dan eceran ... (rekaman tidak jelas) ... kemudian di rumah tangga dan lainnya itu sisanya, jadi total sekitar 2,3 juta ton.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./ WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau cukup harga tinggi dan di Blitar, saya dari Blitar Pak. Jadi Harga tinggi itu dan para peternak nggak bisa mengakses jagung ini masalahnya di mana. Kalau di Blitar itu hanya di sana sendiri, ya di sana sendiri dengan peternak yang segitu banyak hanya 24 hari cukupnya untuk ngasih makanan bagi para peternak.

DIRJEN TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Kondisi saat ini varietas harga dibanding HPP, HPP-nya tadi HAP (Harga Acuan Pembelian) Kemendag itu Rp4.500. Harga pasaran peternak sekarang Rp5.500 maksimal Rp6.000 sehingga ada disparitas sekitar Rp1.000 lebih. Nah, ini posisi panen itu tidak merata musiman, sementara kebutuhan telur itukan harian rutin pakan itu, wilayahnya. Nah, sebarannya wilayahnya juga demikian daerah-daerah panen dan tidak. Kemudian ini di struktur industry pakan itu ada perusahaan besar, ada peternak kecil. Nah, kemampuan mempunyai stok yang peternak kecil kemudian membeli, kepengennya petani *cash and carry*, peternak pengennya tunda dulu dan sebagainya itu menjadi kendala untuk akses jagung oleh peternak-peternak kecil. Nah, solusinya tadi ada solusi jangka pendek, jangka menengah, dan seterusnya. Ini misalnya bagaimana memperlancar dari daerah-daerah sentra panen ke peternak-peternak secara bagus. Untuk menengahnya kami membangun kemitraan. Jadi petani-petani jagung yang kita bina, kita fasilitasi, dan seterusnya ini untuk bermitra kepada peternak kecil, sehingga ada jaminan pasokan dan harga juga disepakati bersama mereka, sehingga enak sama enak antara petani jagung dan peternak telur.

Demikian Ibu, terima kasih.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Sementara yang mau direncanakan, memang tidak bisa ya setuju Pak Slamet bahwa tidak bisa serta-merta karena pasti ada *balancing* antara peternak dan petani jagung. Makanya memang kita perlu serius memperhatikan masalah jagung ini. Saya kemarin ini baru pulang, baru nyampe dari Dapil memang bertemu dengan para peternak di sana, dari tentang termasuk juga harga, kan harga telurnya sangat murah sekali. Ini yang bikin semakin menangisnya para peternak itu.

Pak Wamen, *monggo* silakan.

WAKIL MENTERI PERTANIAN RI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Kang Dedi, Bu Anggi, sebenarnya saya perhatikan antara masukan dan jawaban juga memang sudah terjadi ini Kang Dedi Ketua. Kebetulan Bu Anggi dengan saya berkhidmat di tempat yang sama di PBNU yang notabene memang banyak sekali utamanya dari Blitar itu memang peternak telur, peternak ayam telur. Ketika mereka melakukan demo di Kementerian Pertanian beberapa bulan yang lalu ya Pak Sekjen, itu memang saya panggil. Sebenarnya permasalahan utama adalah bagaimana mensinkronisasi persoalan antara pengusaha pakan, baik itu yang besar maupun yang kecil terhadap para peternak-peternak rumahan. Yang memang dalam hal ini sangat dirugikan sementara ini.

Saya sampaikan apa permasalahan utamanya saya tanya. Pertama Pak, telur ini Pak Wamen pernah berpikir nggak demikian murah. Ketika itu mereka sampaikan Rp20.000 per kilo berisi 16-17 butir, ongkos sampai di Jakarta Rp500 per kilo, kalau dibagi itu kurang lebih hanya Rp1.300 per butir. Sebenarnya memang angka tersebut sudah tidak manusiawi sekali ini Kang Dedi, ini bisa lebih mahal krupuk dari pada telur. Bahkan kalau kita lihat di kota-kota besar harga telur disajikan di meja ini cukup tinggi angkanya. Jadi sebenarnya apapun permasalahan, baik termasuk soal ketersediaan stok jagung yang sudah disampaikan oleh Eselon I saya tadi Pak Wandu, bahwa ketersediaan sebenarnya *sustain*, artinya stabil dan ada. Cuma bagaimana membuat kondisi ini bahan pokok ini sampai ke tangan kawan-kawan peternak ini dengan masif dan tidak adanya pelanggaran di lapangan.

Jadi dalam Rapat Kerja kali ini saya sampaikan kalau stok *buffer* kami di Kementerian Pertanian cukup, bahkan lebih untuk tahun ini. Cuma memang kita harus coba bagaimana membuat situasi ini stabil dan kondusif. Nah, inilah kita perlu dukungan sama-sama juga dari kawan-kawan Komisi IV DPR RI untuk mengingatkan para pengusaha-pengusaha pakan kita agar, ini memang klasik seperti yang Kang Dedi disampaikan kalau dengan Perdagangan dan Pertanian dulu saya sampaikan ke kawan-kawan kita jangan bangga dulu, karena kita dulu memang ada Bapokting. Bagaimana mengedukasi masyarakat, di satu sisi misal harga beras kenapa harus demikian, kenapa harus tinggi tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat. Di satu sisi tentu kita

juga harus berpikir bagaimana daya beli masyarakat, apakah masyarakat mampu membeli dengan harga tertentu. Nah, inilah yang perlu kita terus mengedukasi masyarakat agar memang semua keinginan kita kestabilan ini bisa tercapai antara masyarakat dengan Pemerintah.

Ini yang saya harapkan dan saya sampaikan kepada kawan-kawan di Kementerian untuk sering melakukan edukasi, memberikan informasi yang valid, informasi yang tepat. Dan kalau memang ada kritik-kritik dari masyarakat utamanya sampai bahwa demo ya Bu Anggi, kita sama-sama tahu di Blitar ini memang beberapa daerah sebenarnya Lampung juga. Ini memang cukup memprihatinkan bahkan sampai ke istana. Nah, saya sampaikan ke kawan Kementerian ayo kita coba duduk bareng, solusinya adalah bagaimana kita memberikan masukan juga kepada kawan-kawan di pengusaha ternak tersebut Kang Dedi.

Terima kasih, sementara begitu.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Ketua, sedikit.

KETUA RAPAT:

Siap, gimana.

F-PKS (drh.H. SLAMET):

Terima kasih Pak Ketua.

Ibu Anggi karena Dapil beliau, sederhana sebenarnya Pak Wamen, solusi jangka menengahnya KPPU panggil presiden kawal kartelisasi tegakkan, sehingga itu akan selesai. Karena memang permainan ini ada di perusahaan-perusahaan besar, tidak sekedar bisa dihimbau oleh Komisi IV DPR RI, komandannya Presiden, panggil KPPU turun. Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Setuju Pak, kita panggil, kita lihat saja, kita urai bareng-bareng, karena ini kasihan para peternak.

F-PKS (drh.H. SLAMET):

Kalau yang panggil KPPU kewenangan Komisi VI DPR RI, sehingga kita minta Presiden langsung ngawal itu KPPU, seperti itu.

F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./ WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kita nggak bisa manggil ya.

KETUA RAPAT:

Cara persoalan stok pakan dari dulu kan begitu, kenapa itu meningkatkan siapa yang punya kendali dari harga pakan, pastikan tuan besar. Kenapa tuan besar memainkan peran itu? agar para peternak lokal nggak sanggup membiayai produksi. Kalau nggak sanggup produksi maka siapa nanti yang punya produksi ya tuan besar. Maka nanti tuan besar lah yang menjadi pengendali harga lagi. Jadi saya yakin kalau ini yang terjadi dan itu bukan hanya pada ayam telur. Tahun yang lalu kita ribut ayam pedaging juga sama kan, harga ayam sayurnya jatuh, begitu ayam sayurnya jatuh tak mampu lagi memproduksi gulung tikar. Nanti kalau sudah gulung tikar peternak lokal nanti harga akan stabil, karena harga dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar.

Nah, kemudian kalau bicara kartelisasi kemudian urusannya dengan pengusaha besar ya jujur saja kita semuanya tidak bisa bersikap tegas, karena hari ini sudah terjadi kekuatan yang simbiosis antara dunia usaha, birokrasi, dan dunia politik, kita jujur saja. Nah, inilah yang harus kesadaran kolektif inilah yang harus dibangun. Kita boleh bermitra tapi jangan diatur itu saja, jangan diatur termasuk di Kementerian jangan diatur-atur, urusan itu kan bersimbiosis dengan para pengusaha besar yang mengendalikan pakan, yang mengendalikan daging ayam, dan berbagai hal. Kita nggak usah ngomong panjang-panjang faktanya memang begitu. Dan agar faktanya terurai dan selesai biasanya Pak Hermanto yang paling ahli fakta dan paling pandai untuk mengkritisi. Tapi kalau sudah menjabat juga belum tentu juga kritis ketika jadi Anggota DPR.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Ketua ini baik sekali sekarang, banyak sekali satir-satirnya.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pak Ketua, Pimpinan, Anggota, Pak Wamen, beserta jajaran Kementerian Pertanian.

Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa anggaran 2022 itu turun dari 2021 ini Rp19,8 triliun, sekarang menjadi Rp14,5 triliun. Artinya ini adalah kurang atau turun sebesar 5 koma sekian triliun. Saya ingin mengingatkan saja bahwa ini jelas ada dampaknya, ada implikasinya terhadap tingkat produktivitas pertanian kita. Dengan anggaran besar saja kita itu masih ketar-ketir untuk memperbaiki sisi hulu dan hilir dari usaha pertanian kita ini, apalagi sekarang ini turun sekian cukup signifikan ya. Saya mengingatkan Pak Menteri, Pak

Wamen, dan juga jajarannya supaya Kementerian ini punya strategi yang tepat untuk bagaimana supaya jumlah anggaran yang sudah kecil ini, ini bagaimana kita berpikir cepat produktivitasnya naik lebih besar. Kalau ini kejadian seperti ini tentu kita ukur nanti dengan misalnya pada saat 2021 ini tingkat produktivitasnya tertentu, kemudian di 2022 tingkatnya tertentu, nah kita lihat apakah memang anggaran kecil ini bisa menguntungkan atau tidak bagi petani. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini terkait dengan soal Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tadi Pak Ketua sudah menyebutkan bahwa kita sudah melakukan pembahasan. Namun, ada satu sisi yang perlu kita pikirkan bahwa ini nanti akan terjadi pergeseran birokrasi, yang sekarang ini di bawah Menteri ada di ruang lingkup Kementerian. Tapi nanti Badan Riset dan Inovasi Nasional ini berada di bawah Presiden. Jadi akan terjadi misalnya setiap Kementerian ingin melakukan atau butuh terhadap sebuah riset terapan inikan perlu ada satu titik birokrasi yang harus dilampaui. Nah, menurut saya ini kalau misalnya kita semua badan-badan riset yang ada di Kementerian digabungkan ke sana, maka ini akan resikonya kita harus berpikir bagaimana program-program yang ada di Kementerian ini itu yang bersifat praktis itu ke Kementerian saja. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk melakukan sebuah koordinasi yang panjang, kita perlu koordinasi yang singkat, padat, sehingga kita bisa menerapkan program-program yang kita susun ini. Itu yang kedua.

Yang ketiga, ini ada berapa jenis program di sini ada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, di sini ada Alsintan. Saya belum menemukan unit atau volumenya. Kemudian juga pompa air belum ditemukan, kemudian juga ada berapa ini ada 3. Saya ingin agar ada penjelasan apakah ini memang tidak ada volumenya tapi ada angka anggarannya.

Kemudian juga terkait dengan Bimtek, kami sudah diskusi dengan berapa penyuluh. Para penyuluh ini juga ingin meningkatkan kapasitasnya, terutama penyuluh pertanian, bahwa mereka pun juga perlu untuk meningkatkan kapasitasnya terkait dengan soal bagaimana mereka bisa melakukan pendampingan terhadap petani. Oleh karena itu, saya minta juga ada semacam Bimtek untuk peningkatan kapasitas penyuluh. Kalau yang sekarang lebih pada soal petani, walaupun ada kombinasi antara penyuluh dengan petani, tapi kita ini supaya khusus penyuluh dengan materi yang lebih *advance*. Sehingga penyuluh ini bisa mendampingi petani lebih efektif dan lebih bisa meningkatkan kinerja dari petani.

Kemudian terkait dengan kawasan-kawasan atau kampung-kampung, ada kampung benih, ada kampung bawang, dan segala macam. Nah, ini saya datang kesana itu kelompok yang menerima itu baru hanya menerima mulsanya saja. Petani di sana sudah melakukan pengolahan lahan tapi benihnya belum sampai juga sekarang. Nah, saya khawatir nanti petani ini tidak melanjutkan, saya minta supaya ini juga harus segera diselesaikan supaya petani tidak kecewa.

Nah, kemudian yang terakhir ini terkait dengan soal penyuluh. Ini ada beberapa penyuluh kita ini, ini aspirasi dari penyuluh saya sampaikan. Ada

beberapa penyuluh tidak lulus P3K, ini mohon minta diselesaikan supaya ini bisa persoalan kita selesai tuntas 100%. Kalau masih ada tersisa-sisa saya mendengarnya ada kurang lebih 3.000 lagi. Nah, saya minta supaya ini bisa diselesaikan bagaimana ini. Penyuluh ini kita tidak bolak-balik ngurusin penyuluh soal statusnya ini, padahal mereka juga adalah bagian dari pada usaha kita untuk meningkatkan produktifitas pertanian.

Demikian Pak Ketua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Dua fokus ya, fokus yang pertama saya tadi ralat ya masalah tengkulak. Tengkulak itu masih dibutuhkan di daerah, karena yang membeli produksi-produksi pertanian bahkan di bawah standar mereka yang membeli. Dan kemudian mereka membawa ke pasar tradisional, sehingga produksi jambu yang kualitasnya rendah, kemudian buah-buahan yang kualitasnya rendah, sampai kecapi yang tidak laku itu masih dibeli oleh para tengkulak. Dan mereka turun temurun justru ancaman bagi para petani lokal di daerah itu adalah hilangnya budaya tengkulak, karena kalau tidak ada tengkulak pisang itu nggak ada yang beli yang keliling ke kebun-kebun, kemana-mana, karena mereka seringkali sedangkan ke pasar besar mereka harus memenuhi standar sehingga tengkulak dibutuhkan. Yang tidak dibutuhkan di negeri ini adalah calo, mereka yang tidak pernah membeli, mereka tidak pernah jual, tapi hanya mempertemukan pembeli dengan penjual. Dan biasanya yang paling gemar pengen impor itu adalah para calon sebenarnya, beradanya ya di sini di Jakarta.

Yang kedua, kita tegas saja bila perlu Pak Hermanto saya setuju ini lama-lama petugas penyuluh lapangan kalau Kementerian Pertanian tidak mengambil langkah lama-lama hilang Pak, nggak akan ada lagi di daerah-daerah karena tidak terurus, tidak fokus, kasihan mereka. Kalau dulu jaman Pak Harto satu desa satu pakai motornya paling bagus jaman itu. Sebelum kepala desa punya motor mereka sudah punya motor yang hebat. Hari ini penyuluh kita waduh sudah banyak honorer, kurang mendapat perhatian juga dari Pemerintah Daerah. Untuk itu caranya satu-satunya adalah diambil lagi menjadi tenaga Kementerian Pertanian jadi pegawai pusat. Baru kita bisa membuat desain penataan pertanian secara nasional dengan baik. Kasihan nasib mereka oleh Kementerian Pertanian bukan lagi kewenangannya, oleh Pemerintah Daerah banyak yang tidak diurus dengan baik.

Untuk selanjutnya dipersilakan dari Kementerian Pertanian diwakili Pak Wamen untuk memberikan jawaban. Dan setelah ini langsung kita simpulkan.

F-PG (Ir. HANAN A ROZAK, M.S.):

Sebelum Pak Wamen Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (Ir. HANAN A ROZAK, M.S.):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota, serta Pak Wamen dan jajaran.

Pertama, terkait dengan jagung tadi Pak, ya saya pikir kita harus berhati-hati ngambil kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam. Terkait dengan kenaikan harga pakan Pak, tolong nanti kawan-kawan dari Ditjen PKH untuk mengevaluasi, karena saya berteman dengan kawan-kawan dari pengusaha industry ayam ras itu. Sering saya dengar pembicaraan bahwa komponen pakan itu Pak, itu 70%-nya dari luar. Nah, ini yang menyebabkan harga pakan ini meningkat jagungnya apa komponen impornya. Nah, ini perlu diuraikan ini, jadi jangan sampai menyalakan petani jagung kita. diintervensi petani jagung kita harganya tinggi mau diturunkan, padahal yang berdampak signifikan terhadap kenaikan harga pakan itu komponen impor misalnya seperti itu. Ini saya kira perlu diurai lagi, saya tidak tahu apakah sekarang komposisinya masih seperti itu 70%-30%, 70% impor komponen pakan itu, 30% yang dari komponen dalam negerinya, mungkin jagung 30%.

Kemudian yang kedua Pak, menaiknya harga jagung ini di lapangan itu orang menanam jagung itu pada lahan yang sama, lahan kering. Kalau yang lahan sawah ya dia pasti padi terus sejauh ada air dia akan padi terus. Tetapi di lahan kering ini akan pindah-pindah Pak, kalau harga jagung tinggi petani singkong, petani ubi kayu akan bergeser dia, berikutnya dia akan tanam jagung. Nah, karena petani ubi kayu tanam jagung, lahan ubi kayu berkurang, otomatis supply ubi kayu itu menurun, harga ubi kayu membaik. Terus saya melihat fenomena kenaikan harga jagung ini, baik untuk yang lainnya juga Pak. Jadi ini saya kira perlu hati-hati mengambil keputusan terkait bagaimana apa namanya mengatasi yang sudah dipersoalkan selama ini, bahwa naiknya pakan itu akibat harga jagung. Saya belum yakin jangan-jangan komponen impornya, komponen impornya naik sehingga harga pakan naik, seperti itu.

Kemudian ke Dirjen Tanaman Pangan Pak. Dengan turunnya anggaran yang begitu besar sampai 50% ya, ini saya kira tolong Dirjen Tanaman Pangan fokus untuk urus benih Pak, urus benih padi, benih jagung, benih kedelai, dan benih-benih yang lainnya. Bagaimana bisa mendekatkan benih itu kepada petani, petani bisa memperoleh benih, mendapatkan benih dalam jumlah cukup dengan harga yang baik, kemudian dengan varietas yang baik.

Kemudian yang kedua pupuk, bagaimana pupuk ini bisa apa namanya diterima, bisa diperoleh oleh masyarakat tani kita dengan harga yang wajar, kemudian waktu yang tepat, jumlah yang tepat. Begitu juga sama penyakit Pak, tolong mendapat perhatian. Tiga ini saja Pak, akibat diturunkan itu yang lain-lain nanti dulu tiga ini saja. Kalau tiga ini diperhatikan *Insyallah* target Bapak,

untuk padi 55 juta ton saya kira bisa aman-aman saja Pak, begitu juga untuk jagung dan sebagainya.

Tadi terkait dengan anggaran ya sebenarnya terancam Kementerian Pertanian ini turun lagi Rp2,9 triliun Pak. Manakala ada 3 instansi tadi badan-badan ini akan bergeser. Itu saya hitung tadi Rp2,9 triliun Karantina, plus Litbang, plus Badan Ketahanan Pangan ya. Jadi bisa turun lagi ini kalau seandainya tahun ini bergeser, tahun depan bergeser 3 badan ini.

Saya kira ini tambahan dari saya. Kemudian saya titip juga Pak, ke depan kalau membuat target-target selain produksi saya minta juga ada target-target terkait dengan pendapatan petaninya Pak. Jadi kita jangan sisi produksi mengamankan target-target Pemerintah tapi sisi petaninya. Petani jagung misalnya saat ini pendapatannya berapa rata-rata. Nah, target kedepannya seperti apa. Jadi saya kira harus ada target-target dari sisi petaninya juga.

Demikian Bu, terima kasih.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, terima kasih.

Bapak, Ibu masih ada untuk pendalaman.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Dari saya Ibu Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos.,M.Si.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Pak Wamen, Pak Sekjen, beserta jajaran Eselon I.

Menyoroti kaitan Pagu Anggaran Kementan tahun 2022 memang sangat disayangkan ya setiap tahun ini semakin mengalami penurunan. Padahal kita tahu di tengah-tengah COVID-19 ini sektor pertanian mendukung cukup lumayan besar ya terhadap PDB, serta laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi keberpihakan serta keseriusan Pemerintah untuk mendukung sektor pertanian masih sangat rendah sekali, sangat kurang. Nah, ini tentu diperlukan kerja keras, berpikir keras dari jajaran Kementan ini bagaimana pembangunan pertanian ini di seluruh Indonesia tetap berjalan secara optimis.

Di samping itu dengan anggaran kecil saya melihat, bahwa dalam menyusun rencana kerja proporsi anggaran yang di berikan ini kurang proporsional. Di mana kegiatan untuk mendukung manajemen lebih mendominasi ketimbang dari pada program yang lain, seperti program nilai tambah dan daya saing industri ini sebetulnya merupakan program cukup bagus ya langsung dirasakan oleh petani kita.

Nah, kaitkan dengan tadi transformasi tentang Balitbang ke BRIN. Ini mungkin saya juga menyoroti bahwa ke depan ini ada beberapa Tusi yang akan dilakukan oleh Badan Standarisasi dan Sistem Pertanian, di mana penelitian terapan ini akan dialihkan kepada Kementan ya Kementerian Pertanian, penelitian dasar ini akan diberikan kepada BRIN. Saya berharap dengan transformasi ini jangan sampai yang terjadi ada intervensi dari pihak swasta, di mana para peneliti mungkin yang akan masuk ke dalam Kementerian Pertanian ini saya kira strategis yang dirasakan langsung kepada petani kita dan rakyat kita yang akan memanfaatkan hasil penelitian. Tetapi menjadi tanda tanya besar penelitian dasar yang akan di serahkan ke BRIN ini desainnya itu seperti apa. Ini mungkin yang harus bersama-sama kita antisipasi sedini mungkin, jangan sampai sektor pertaniannya apalagi dari sisi penelitian ini masuk ke dalam ranah swastanisasi. Khawatirnya meninggalkan dari kesejahteraan petani itu sendiri, produksi, dan produktivitas akan terganggu. Dan kesempatan para petani kita juga akan hilang kalau ada persaingan yang terbuka lebar dengan swastanisasi dari sektor pertanian.

Yang berikutnya, isu yang ada saat ini bahwa Oktober ke depan ini kita kan akan persiapan mungkin mengalami masa pancaroba ya, persiapan menghadapi hujan yang lebat. Ini juga apa langkah yang akan dilakukan, memang yang disampaikan oleh pihak Kementerian Pertanian ini sudah ada beberapa strategi upaya-upaya yang akan dilakukan, seperti misalkan strategi jangka pendek dan jangka menengah. Akan tetapi kalau dari penganggaran ini belum ada upaya untuk bisa mengarahkan secara optimal terhadap bagaimana menghadapi masa-masa hujan yang cukup lebat untuk sawah para petani kita. Karena melihat dari beberapa program ada di semua Dirjen ini masih sangat minim. Saya kasih contoh saja, misalkan pada Ditjen PSP, Ditjen Pangan, kegiatannya inikan hanya berkisaran 3.750 hektar dengan anggaran Rp10 miliar, belum Ditjen Horti hanya menyiapkan 25 hektar, dan di Litbang sendiri pemetaan kesesuaian teknologi sumber daya pertanian mitigasi juga masih sangat kurang. Belum bicara jaringan irigasi, tersier, dan sebagainya masih sangat minim. Sementara persoalan itu yang sangat dibutuhkan di saat musim waktu penghujan.

Kaitan dengan *mapping* wilayah rawan banjir, strategi yang sudah akan di lakukan ini bentuknya seperti apa, mengambil data-datanya dari mana, serta berapa mungkin wilayah-wilayah yang memang rawan banjir ini, apakah melalui mungkin pemetaan atau photo dari drone dari atas atau bagaimana. Nah, ini mungkin yang belum dijelaskan oleh pihak Kementerian.

Dan terakhir, kaitan mungkin aspirasi ini bahwa di kami ini mohon kiranya penyuluh pertanian dari Kabupaten Serang ini, ini masih belum terakomodir ya menjadi pegawai P3K. Mungkin keterlambatan dari Pemerintah

Daerah atau secara apa informasi ini belum diketahui, mohon dibantu dari teman-teman Kementan agar penyuluh pertanian di Kabupaten Serang bisa diakomodir masuk P3K.

Di samping itu untuk program Ditjen PSD kan banyak itu Alsintan yang sudah didistribusikan dan dirasakan manfaatnya oleh para petani kita. Akan tetapi memang yang kita butuhkan para petani kita itu kaitan dengan pemeliharaan Alsintan tersebut. Apakah di rancangan 2022 ini sudah masuk kah atau seperti apa. Mungkin itu tambahan dari saya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ketua, saya ijin Ketua.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum Salam.

Pak Hermanto tadi sudah kan?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sedikit, ada lagi yang belum.

KETUA RAPAT:

Setengah menit.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

2 menit lah.

KETUA RAPAT:

1 menit, silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

1,5 menit.

Jadi begini ini terkait dengan soal jagung, saya minta supaya Kementerian melalui Wamen itu bisa melakukan satu analisis tentang bentuk pasar jagung ini. Apakah dia bersifat oligopoly, apakah bersifat ... atau juga nanti mengarah kepada monopolistic. Karena ini nanti bentuk-bentuk pasar ini akan berdampak kepada tata kelola jagung. Jadi rantai tata kelola jagung inilah yang harus kita cermati seperti apa sih, tadi disebutkan ada tengkulak, ada segala macam, antara produsen dengan pasarnya. Nah, jadi kita kan hanya tahu lah berapa saja sih perusahaan-perusahaan yang membeli ya. Jadi kalau

dia terkait dengan pembeli produk-produk jagung langsung dari petani inikan hanya berapa saja perusahaannya, nggak banyak. Jadi kalau perusahaan ini tidak banyak sepertinya lebih mudah kita ngontrolnya, sehingga kita bisa juga ketahui seperti apa sih perusahaan ini mempengaruhi harga pasar. Jadi saya minta supaya ada regulasi yang bisa mengatur bagaimana peran dari pada Pemerintah untuk mengatur oligopoly-oligopoli ini dan monopoli-monopoli ini, sehingga dia bisa mensejahterakan petani jagung dan tentunya bisa bagaimana dia bisa menekan biaya dan bisa menyerap produk-produk jagung ini.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak dan Ibu.

Sudah cukup untuk pendalaman, Bapak Bambang mau ada pendalaman? Nggak jadi.

Baik, Bapak dan Ibu terima kasih, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan semua Eselon I. Sudah banyak yang jadi masukan dari para Anggota, jagung ini menjadi sentral pembicaraan di samping juga tentang transformasi kelembagaan ini juga penting diantisipasi. Beberapa Anggota juga sudah meng-*highlight* Pak Sekjen beberapa waktu yang lalu waktu kita RDP juga sudah kita bahas secara tuntas. Memang secara gamblang tetapi memang waktu itu Pak Ichsan minta simulasi kalau tidak salah ya, simulasi tentang skenarionya seperti apa untuk transformasi itu. Supaya beberapa yang memang yang menjadi perhatian dari Kementerian Pertanian ini memang benar-benar masih bisa di lakukan. Tentang misalnya kalau namanya Badan Standardisasi dan Sistem Pertanian itu Tupoksinya seperti apa yang akan di ditempatkan di BRIN itu apanya, apakah penelitiannya atau kan penelitian dasar. Apakah peneliti-peneliti yang ada selama ini berada di Kementerian Pertanian ini masih berada di Kementerian Pertanian, dan ini harus di harus diantisipasi secara jeli, karena belum tentu mereka juga bisa berpindah langsung. Kalau misalnya dipindah ke penyuluh kemarin kan sudah ada sempat ada pembicaraan seperti itu dan mereka kan belum tentu mau juga jadi penyuluhan kalau peneliti-peneliti ini. Ini perlu diantisipasi secara cermat termasuk juga fungsinya, misalnya pemanfaatan teknologi itu tetap harus dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Pertanian.

Lalu kemudian kebijakan tentang pelaksanaan standarisasi tentang pertanian itu juga tetap harus dilakukan oleh teman-teman dari Pertanian. Dan ini yang harus *clear* untuk di skemakan sehingga ketika saya setuju kita harus bicarakan ini lebih detail lagi, karena kebetulan di Komisi IV DPR RI inikan ada tiga Kementerian yang memang punya masalah yang sama, meskipun sebenarnya kalau yang di KKP dan KLHK sudah sudah lama menuju transformasinya. Nah, ini perlu didiskusikan secara detail dan kita tahu *next step* atau bahasanya *exit strategy* untuk menghadapi transformasi ini, karena mau nggak mau Perpresnya nggak ada, jadi tetap harus kita hadapi. Yang paling penting adalah bagaimana isu-isu yang memang menjadi kewajiban untuk kita menyediakan pangan, mendapatkan produktifitas yang baik, pemanfaatan hasil dari penelitian itu tetap dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Pertanian.

Saya pikir itu silakan Pak Wamen dan....

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ibu Alien silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ijinkan saya bicara tidak lebih dari 30 detik.

KETUA RAPAT:

Saya ijin.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Ini sudah bentar lagi masuk jam 14.00 WIB sekiranya kita *break* dulu untuk Ishoma dan juga makan siang. Kemudian saya pikir Pimpinan saya yang paling cantik ini mengertilah. Situasi dan kondisi sekarang pasti pada mau keluar semua ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita *break* dulu atau bagaimana?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI (Dr. Ir. KASDI SUBAGYONO, M.Sc.):

Jika diperkenankan karena masih ada sebentar lagi Pak Wamen harus hadir ke Ratas Ibu. Mohon ini tidak perlu *break* langsung saja untuk bisa kita selesaikan.

Terima kasih Ibu, jika diijinkan.

KETUA RAPAT:

Atau kita *break* sebentar saja ya, karena....

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ibu Ketua, tadikan sudah diskors 15 menit dan juga sudah masuk Dzuhur, itukan 15 menit juga sudah molor 30 menit. Saya pikir itu sudah waktu yang memang sudah cukup untuk skors, jangan sampai dua kali.

KETUA RAPAT:

Intinya apa saya nggak kedengaran, maaf Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Nambah lagi menit kalau nggak kedengeran. Maksud saya begini, tadikan kita sudah skors ya itu 15 menit tapi prakteknya itu adalah 30 menit yang saya rasakan. Ini mau diskors lagi berarti kan butuh waktu lagi.

KETUA RAPAT:

Baik, Ibu Alien apakah kita langsung saja.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Kalau saya sih sarannya *break* tapi kalau memang nggak mau ya sudah terserah. Sampai sore pun jangan *break* ya, awas kalau benar-benar Pak Sekjen minta *break*, ini bisa sampai jam 6 sore jangan tinggalin rapat.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Ibu Ketua, saya ijin.
Pak Wamen jam berapa Ratas?

WAKIL MENTERI PERTANIAN RI:

Jadwal dengan Presiden 13.30 WIB, saya undur 14.30 WIB Pak Ichsan.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Kita *break* dulu 5 menit deh, biar ada kesempatan untuk itu. Saya usul Pak Hermanto kita *break* sekitar 5 menit untuk istirahat atau 10 menit, kalau saya usul.

KETUA RAPAT:

Break-nya untuk apa, kita ngomongin *break* malah lama juga ya.

F-PG (Ir. MOH. ICHSAN FIRDAUS):

Sholat dulu.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Nggak Pak Ichsan, tadikan kita 15 menit tadi itukan itu adalah waktu di mana kita bisa Ishoman.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pak Hermanto kita juga ditegur ini live Pak, orang juga pada bilang kenapa nggak Ishoman dan sebagainya. Itu saja Pak Hermanto, kita sih sebenarnya nggak mau *break* juga kalau bisa sampai sore, sampai besok juga oke-oke saja.

KETUA RAPAT:

Oke, kita break 10 menit ya.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

5 menit tadi Pak Ichsan.

KETUA RAPAT:

10 menit, nggak bisa kalau sholat 5 sebentar.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

5 menit.

KETUA RAPAT:

10 menit ya *break*.

(RAPAT DISKORS)

Baik, skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Pak Wamen, Pak Sekjen, dan Bapak-bapak Eselon I Kementerian Pertanian, Bapak dan Ibu Anggota.

Kita tadi sudah banyak masukan dan saatnya Bapak dan Ibu dari Kementerian Pertanian untuk memberikan jawaban dari atas semua masukan, pertanyaan dari para Anggota. *Monggo* tidak perlu lama-lama untuk bisa menjawab.

Silakan Pak Wamen.

WAKIL MENTERI PERTANIAN RI:

Baik, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Ketua, banyak sekali masukan yang memang sudah kami catat. Sebagian kami akan jawab secara tertulis, namun ada beberapa pertanyaan

yang sebenarnya juga semua krusial, tapi sangat krusial utamanya adalah pembentukan lembaga baru, ada BRIN, dan Bapanas, juga satu lagi persoalan bagaimana menjaga keseimbangan antara petani, juga dalam hal ini masyarakat sebagai konsumen.

Pertama, tentu kita harus mengerti harapan Pemerintah dalam hal ini Bapak Peesiden dan Bapak Wakil Presiden, utamanya mengefisiensikan KLN, mengefisiensikan unit-unit Pemerintah di bawah beliau dengan maksud agar semuanya bisa bersinergi dengan baik. Bapanas diutamakan adalah dalam rangka karena selalu adanya perbedaan kepentingan, walaupun sebenarnya bukan perbedaan kepentingan antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. Dalam hal ini kami dengan Kementerian Perdagangan memang ada Tupoksi yang berbeda, kami fokus masalah produksi, sementara Kementerian Perdagangan tentu masalah profit, masalah pemasukan.

Nah, untuk mensinergikan kedua Kementerian tersebut, maka dibentuklah Bapanas. Semoga ke depan Bapanas kita harapkan bisa benar-benar berwibawa, bisa menjawab semua tantangan, menjawab semua hal-hal yang memang masih menjadi masalah beberapa tahun belakangan ini. Kedua, juga soal masalah menjaga keseimbangan tadi kebetulan ada Ketua Kang Dedi menyampaikan soal porang, juga ada produk-produk lain. Kami utamanya di Kementerian Pertanian sangat konsen untuk bagaimana caranya produk-produk tersebut bisa sampai ke hilirisasi. Karena menjawab semua masalah kartel dan sebagainya saya sampaikan ke kawan-kawan kepala daerah yang saya kunjungi Kunker, baik saya yang Kunker maupun mereka yang datang ke kantor saya. Kabupaten, Kota, Provinsi, saya sampaikan agar mereka segera membentuk perusahaan-perusahaan daerah utamanya pangan, agar masalah-masalah yang sekarang kita bahas ini yang mengemuka ini bisa terjawab. Karena dengan demikian, banyak sekali harapan-harapan Pemerintah yang di informasikan ke masyarakat, petani milenial, petani berdasari, terus juga masalah produk-produk tambahan yang baru semacam porang.

Saya sampaikan ke Pak Presiden, "Pak saya tidak terlalu khawatir soal mekanisme pasar, karena untuk saya kalau disiapkan produk-produk akhir tersebut sampai ke hilirisasi, sampai ke retail, sampai ke produk di atas meja *Insyah Allah* mudah-mudahan hal ini bisa tereliminir". Kekhawatiran-khawatiran kita *Insyah Allah* mudah-mudahan tidak terjadi, Kenapa demikian? karena kita tidak hanya menjual bahan pokok yang mentah, tapi kita siapkan sampai ke hilirisasi. Utamanya tadi saya ambil contoh yang Kang Dedi maksud soal porang, porang merupakan memang sementara ini buat Presiden sangat diutamakan, sangat fokus. Cuma saya sampaikan ke Pak Presiden "Pak yang utama adalah banyak sekali beberapa tahun belakang kemarin ada buah merah, ada mengkudu, itu bisa hilang begitu saja 2-3 tahun, karena kita tidak siapkan produkhilirisasinya". Kalau kita ambil contoh porang banyak sekali produk turunannya, ada komestik, ada tepung porang, bisa jadi beras porang, dan lain-lain. Nah, ini kita harapkan masyarakat juga melalui kesempatan ini saya juga berharap kawan-kawan Dewan bisa mensosialisasi bagaimana menstimulasi, memotivasi masyarakat utamanya kaum muda untuk gemar dan ingin menjadi pioneer begitu katakan di bidang pangan.

Demikian mungkin sedikit yang saya sampaikan. Untuk lebih teknis kawan-kawan dari Eselon I mungkin akan menjawab lebih terinci lagi.

Terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Terima kasih Bapak Wamen.

Bapak dan Ibu Pimpinan yang kami hormati.

Kami menambahkan beberapa hal, yang pertama terkait dengan anggaran Pak Ketua jika diperkenankan Bu Ketua rinciannya kami presentasikan lagi, supaya nanti sinkron untuk yang disimpulkan dalam Raker ini.

Bapak Ketua, Ibu Wakil Ketua, dan Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati.

Setelah membahas beberapa dengan Kapoksi tadi pagi dan juga yang berkaitan dengan beberapa masukan dari 2 agenda itu. Baik, dengan beberapa pergeseran menyikapi dari, Pak Wamen menyikapi dari Anggota tadi bahwa ada proporsi yang perlu balance antara Eselon I, maka ini kami sampaikan perubahan-perubahan sebagai berikut.

Jadi yang akan menjadi alokasi per Eselon I itu kolom kedua sebelah kiri, sebelah kanan Pagu anggaran tahun 2022 pasca realokasi, sehingga posisinya menjadi Sekretaris jenderal dikurangi Rp60 miliar menjadi Rp1,59 triliun, Inspektorat Jenderal tetap, kemudian Ditjen Tanaman Pangan menjadi 2,18 dari 1,76, kemudian Ditjen PSP menjadi 3,005 dari 2,61 mendapat tambahan 391 yang diambil dari berbagai sumber di Eselon I lainnya, kemudian Ditjen Hortikultura itu dikurangi 60 saja untuk bisa menjadi nanti menyangkut masalah beberapa program yang sudah menjadi Gernas, diantaranya adalah pisang dan melanjutkan beberapa arahan dari Bapak Presiden, dari 1,04 menjadi Rp985 miliar. Kemudian Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dari semula Rp1,85 triliun dikurangi 247 menjadi Rp1,61 triliun. Perkebunan dari 1,3 yang semula lokasinya dikurangi Rp132 miliar menjadi Rp1,18 triliun, ini masih meningkat dibanding dari 2021. Kemudian Badan Litbang Pertanian dari 1,33 menjadi 1,29 dikurangi Rp40,8 miliar. BPSDMP dari 1,091 dikurang Rp45 miliar menjadi Rp1,05 triliun. Badan Ketahanan Pangan dari Rp577 miliar menjadi Rp445,99 miliar dikurangi 131. Kemudian terakhir Badan Karantina dikurangi dari Rp1,103 triliun dikurangi 95 menjadi Rp1,007 triliun, sehingga total Pagu 2022 Rp14,451 triliun. Ini proporsi yang sudah kami tadi dengan Kapoksi dan juga beberapa perkembangan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang terkait rencana anggaran.

Kemudian juga diperkenankan kami ingin menambahkan sedikit penjelasan terkait dengan transformasi yang saat ini 2 lembaga yang sudah kami proses, yaitu Badan Litbang Pertanian untuk ditransformasi ke BRIN, kemudian BKP untuk ditransformasi ke Bapanas. Yang terkait masalah Badan Litbang Pertanian, kami laporkan bahwa prinsipnya adalah kita akan mengusulkan untuk ada satu badan di Kementerian Pertanian yang menangani

masalah standarisasi dan juga sistem pertanian. Dan itu nanti terutama juga akan mendukung berbagai masukan juga dari Anggota untuk tetap ada penanganan perbenihan secara masif di setiap provinsi. Oleh karena itu, nanti fungsi dari pada BPTP itu tetap kita pertahankan meskipun nanti penelitiannya tidak lagi ada di situ, tapi kita transformasi menjadi badan yang khusus menangani masalah perbenihan.

Kemudian sebenarnya kami melalui surat Menteri Pertanian kepada BRIN juga sudah bersurat, makanya di dalam sambutan Pak Wamen tadi kami masukkan bahwa yang dimaksud dengan transformasi Untuk memindahkan penelitian dasar itu kami usulan kami, tapi sampai saat ini belum direspon oleh BRIN. Kami tentu pada posisi untuk tetap mematuhi Perpresnya tetapi juga di sisi lain kami juga mengusulkan yang masih bisa mendukung secara langsung untuk Kementerian Pertanian khususnya yang menyangkut masalah perbenihan, kemudian standarisasi alat mesin pertanian, dan beberapa kegiatan lain yang masih sangat relevan untuk mendukung para Ditjen teknis di Kementerian Pertanian.

Berkait dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional), kami laporkan perkembangan sampai dengan saat ini. Mohon maaf yang tadi Badan Litbang Pertanian sampai saat ini kami masih melakukan pemetaan empat hal Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan. Satu, mengait SDM. Dua, mengait aset. Tiga, mengait program dan kegiatan. Empat, mengait anggaran. Ya kita berharap anggarannya tidak diangkut semua di penelitian tetapi yang masih relevan untuk di kegiatannya di Kementerian Pertanian tetap dipertahankan anggarannya, termasuk asetnya.

Kemudian ijin untuk Bapanas, sudah diputuskan bahwa di dalam Perpresnya juga sudah di singgung bahwa BKP menjadi cikal bakal, sehingga semua Tusi, hampir semua Tusi masuk ke sana. Cuma yang sudah kita bahas adalah Bapak Wamen, Bapak para Pimpinan dan Anggota yang kami muliakan adalah masih ada identifikasi kelayakan suatu kegiatan yang sifatnya teknis masih kita pertahankan di Kementerian Pertanian, seperti misalnya P2L, Toko Tani, family farming, lumbung pangan itu masih sangat relevan untuk dipertahankan, sehingga nanti ada proporsi dari perspektif kegiatan dan juga anggarannya dipertahankan di Kementerian Pertanian.

Itu yang saya kira menyangkut masalah dua hal itu yang ingin kami tambahkan. Kami mohonkan Pak Dirjen Tanaman Pangan berkaitan dengan jagung pakan dan pangan. Untuk jagung dan pangan Bapak Pimpinan, kami tambahkan sedikit bahwa sesungguhnya *action* yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, Pak Menteri Pertanian membuat langkah 3 skenario, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya melalui Ditjen Tanaman Pangan men-*supply* saat ini kalau dirasa perlu masih terus tapi saat ini 1.000 ton jagung khusus untuk pakan di tiga tempat, Blitar, Kendal, Jawa Tengah, kemudian di Lampung.

Nah, kemudian jangka menengahnya termasuk mohon maaf, jangka pendeknya untuk peternaknya adalah penyerapan telur dari pada peternak itu oleh integrator. Ini yang sudah kita juga formasikan untuk bisa mengatasi

masalah harga telurnya itu sendiri. Kemudian juga jangka menengah untuk telur itu diolah menjadi tepung telur, itu akan diindustrikan jadi tepung telur. Ini perlu waktu untuk merancang integrator mana yang nanti dibangun pabriknya untuk bisa bekerja sama dalam konteks pengolahan telur ini, supaya tidak *over supply* dan harganya jatuh.

Dan kemudian untuk jangka panjang yang sifatnya permanen, kami merancang untuk jagung pakan ternak ini juga dibuatkan *buffer stock* khusus jagung pakan ternak. Di samping tadi masukan-masukannya dari Pak Pimpinan dan Anggota sangat penting masih terus kami lakukan evaluasi dan validasi terhadap data jagung. Tadi Pak Ketua juga sampaikan itu data jagung, kalau itu adalah misalnya surplus 2 juta ton kami cek di berbagai tempat tadi beberapa sudah disebutkan oleh Ditjen Tanaman Pangan, itu dulu yang kami cek.

Kemudian juga ini soal skater produksi Pak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Misalnya sentra peternaknya tidak *matching* dengan produksi jagungnya, sehingga itu juga akan mempengaruhi dari pada formasi harga yang akan terjadi di lapangan. Itu beberapa hal yang ingin saya tambahkan pada konteks jagung pakan ternak tadi, tapi juga kita mengatasi masalah peternaknya sendiri terkait dengan telur dan juga daging ayam. Saya kira itu tambahan dari saya.

Terima kasih Bapak dan Ibu Pimpinan.
Kami kembalikan.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ijin Ibu Pimpinan.

Jadi gini tadi anda mengatakan 1.000 ton perintah Presiden, perintah Presiden itu 30.000 ton, betul?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Betul.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Dan itu minjem sama GPMT, betul?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Betul Pak, tetapi yang diambil saat ini yang untuk jangka pendek dilakukan itu Pak Menteri melakukan untuk yang 1.000 ton dulu.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Sekjen, itu bukannya jangka pendek, kalau minjem ya minjem bukan jangka pendek. Ini loh, kalau tadi surplus 2 juta ton di mana barangnya, impor gandum saja sudah berapa juta ton. Jangan dihitung bibit yang diberikan kepada masyarakat tetapi produksinya yang dari masyarakat petani rakyat itu

berapa banyak. Ya kalau minjem kan sama juga bohong ini, ya kan bukan jangka pendek itu. Coba ada Litbang, mana Litbangnya? Bisa nggak gandum dijadikan pakan ayam.

**SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI:**

Ijin Bapak, bisa Bapak.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Bisa kan, kenapa nggak wilayah-wilayah tertentu ditanam gandum. Gandum itu dari bijinya, dari daunnya, dari kulitnya, bisa dimanfaatkan semuanya. Itu loh, coba inovasinya berpikir. Hari ini jagung kalau Rp5.000 mau beli gimana, solusinya apa? Jadikan tepung telur, stop impor tepung telur untuk konsumsi lokal, pasti peternak akan terbantu. Mana PT Berdikari? Bisa nggak bikin tepung telur? Bisa, coba kita dengar nanti. Tapi dengan catatan kurangi impor tepung telurnya itu yang penting. Sekarang kalau impor tepung telurnya masih jor-joran ya nggak mungkin biaya produksinya tinggi, apalagi investasi dari awal. Awal investasi, masa konstruksi itukan semua bayar bunga, bunga bank.

Ya, saya sangat prihatin sekali setiap hari saya menerima WA ratusan kali dari petani unggas ini, ini, ini. Sampai saya tanya solusinya apa? Solusinya ya Bapak yang cari solusi katanya, kan bingung juga kalau saya cari solusi. Saya kan nggak paham-paham amat masalah ini. Ini loh yang terjadi, tolong sekali lagi tolong bantu kasihlah kami data yang valid, data yang benar, jadi analisisnya juga akan benar. Pak Kasdi juga mulai goyang-goyang tadi bilang 1.000 padahal perintah Presiden 30.000 dengan harganya Rp4.500. Nah, pertanyaannya bisa nggak? Kalau selisih siapa yang mau nanggung, kan ini persoalannya.

Ibu Ketua silakan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bapak dan Ibu.
Kita masuk ke kesimpulan ya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Pimpinan, sedikit sebelum kesimpulan.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Siap, ini Dokter Hewan yang ngomong pasti ada masukan yang baik.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sudah Pak Ketua yang tadi, kalau masalah jagung sudah di RDPU. Yang ini hanya meyakinkan sebelum disimpulkan, mengingatkan lagi yang

program-program tadi sudah *clear* Pak Sekretaris ya, karena tadi belum ditandatangani gitu Pak Ketua.

Terima kasih.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Dijawab.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Ijin Pak, perlu didetailkan lagi karena ada beberapa pergeseran dari kegiatan yang seharusnya tidak masuk aspirasi, kita gantikan yang bisa masuk aspirasi. Itu yang belum selesai kami rinci Pak, dari pada salah nanti kami konsultasikan itu untuk nanti semua Dirjen menandatangani.

KETUA RAPAT:

Silakan ditampilkan draft kesimpulan.

Baik, Bapak dan Ibu saya baca draft kesimpulan dan keputusan untuk Rapat Kerja kita hari ini.

1. Komisi IV DPR RI menyetujui pagu Anggaran Kementerian Pertanian dalam RKA K/L Tahun 2022 sebesar **Rp14.451.749.428.000,00** (empat belas triliun empat ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah), dengan komposisi per-Eselon I sebagai berikut:
 - a. **Sekretariat Jenderal**, sebesar Rp1.598.813.463.000,00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp97.677.527.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. **Direktorat Jenderal Tanaman Pangan**, sebesar Rp2.188.179.655.000,00 (dua triliun seratus delapan puluh delapan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - d. **Direktorat Jenderal Hortikultura**, sebesar Rp985.515.027.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. **Direktorat Jenderal Perkebunan**, sebesar Rp1.177.410.034.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tiga puluh empat ribu rupiah);
 - f. **Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan**, sebesar Rp1.605.218.582.000,00 (satu triliun enam ratus lima miliar dua ratus delapan belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - g. **Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**, sebesar Rp3.005.669.852.000,00 (tiga triliun lima miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - h. **Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**, sebesar Rp1.293.501.849.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tiga

miliar lima ratus satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- i. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian**, sebesar Rp1.046.607.600.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar enam ratus tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- j. **Badan Ketahanan Pangan**, sebesar Rp445.996.136.000,00 (empat ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
- k. **Badan Karantina Pertanian**, sebesar Rp1.007.159.703.000,00 (satu triliun tujuh miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).

Sudah dicermati ya Bapak dan Ibu, para Anggota?
Pak Sekjen, tolong dicek.
Silakan Pak Wamen.

WAKIL MENTERI PERTANIAN RI:

Setuju Ibu.

KETUA RAPAT:

Para Anggota?

(RAPAT: SETUJU)

Oh iya, ada yang belum ini kehapus di sini. Ini ada redaksi yang memang harus ada karena untuk kepentingan di Banggar besar. "Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hasil pembahasan RKA K/L Kementerian Pertanian Tahun 2022 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan".

Disetujui ya.

(RAPAT: SETUJU)

Coba nomor 2 sudah pasti belum ini yang saya baca?

Oke, kita masuk point kedua.

Point 1 sudah ya tadi Pak Kasdi, aman ya.

- 2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar dalam menyusun rincian program dan anggaran fokus kepada kegiatan peningkatan produksi dan pendapatan petani antara lain kegiatan pada:
 - a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan diantaranya untuk meningkatkan produksi gabah, jagung, kedelai, kacang tanah, serta alat mesin pasca panen;
 - b. Direktorat Jenderal Hortikultura diantaranya untuk meningkatkan produksi tanaman sayuran, cabai, pisang, bawang merah, jahe, dan alpukat;
 - c. Direktorat Jenderal Perkebunan diantaranya untuk mengembangkan kelapa, meningkatkan mutu produksi karet alam, serta pengolahan pasca panen;

- d. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan diantaranya untuk meningkatkan produksi ternak, antara lain unggas, sapi dan domba;
- e. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diantaranya melalui peningkatan volume irigasi tersier, Jalan Usaha Tani, UPPO, alat dan mesin prapanen;
- f. Kegiatan pendukung untuk peningkatan kapasitas petani melalui kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis/bimtek; dan
- g. Kegiatan inovasi teknologi, riset, dan pengembangan inovatif kolaboratif, melalui kegiatan bimbingan teknis, dan perbenihan.

Para Anggota?

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN RI:

Pimpinan, ijin narasi saja point c “Direktorat Jenderal diantaranya untuk pengembangan kelapa, meningkatkan mutu produksi karet alam, serta pasca panen dan pengolahannya”. Nanti bingung itu kalau pengolahan pasca panen.

KETUA RAPAT:

Pasca panen dibelakang dihapus.
Setuju?

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Trisno, silakan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Untuk huruf A mohon ditambah kacang hijau, ini adalah untuk pemanfaatan lahan yang tidak termanfaatkan. Point B, bawang putih.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Point A tambahin kacang hijau, terus point B, bawang putih.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Point C tambahin pala dong Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

Point C?

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Tambahin pala.

KETUA RAPAT:

Dan pala.
Sudah ya, para Anggota?
Pak Sekjen?
Pak Wamen?

WAKIL MENTERI PERTANIAN RI:

Setuju Ibu Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IV DPR RI mendukung usulan Kementerian Pertanian terkait perubahan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian menjadi Badan Standarisasi dan Sistem Pertanian (BSSP) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selanjutnya meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM), aset, program dan kegiatan, serta anggaran dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Para Anggota?
Pak Wamen?

WAKIL MENTERI PERTANIAN RI:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan-kegiatan teknis yang berada di Badan Ketahanan Pangan, seperti Pekarangan Pangan Lestari untuk diintegrasikan pada Direktorat Jenderal teknis yang relevan sehubungan dengan meleburnya Badan Ketahanan Pangan merujuk pada terbentuknya Badan Pangan Nasional.

Para Anggota?
Pak Wamen?

WAKIL MENTERI PERTANIAN RI:

Setuju Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Silakan Ketua.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Terima kasih.

Hari ini kita sudah menyelesaikan Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, yang mana kita punya satu tujuan yang sama, yakni bagaimana petani sejahtera, bagaimana peningkatan produksi, bagaimana impor kurang.

Sebelum saya nutup ini tadi ada usulan PIHC tolong maju dulu Pak sini Pak, dekat Pak Slamet duduk di situ Pak, supaya ada mic-nya.

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY* (ACHMAD BAKIR PASAMAN):

Siap Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebelum besok kita FGD ini akan saya tanyakan perihal masalah selama inikan petani ini seolah-olah makin banyak pupuk makin bagus hasilnya. Nah, kira-kira PIHC ada nggak program Bimtek untuk penyuluh dan petani. Silakan sebelum besok kita tanyakan lagi di FGD tersebut.

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Siap Pak Ketua.

Kami sebenarnya mempunyai program penyuluhan melalui program Makmur yang sekarang sedang dilaksanakan. Di mana kami melakukan artinya pendampingan kepada petani untuk meningkatkan hasilnya. Jadi di beberapa tempat program Makmur ini sudah kami produksi. Dan ini merupakan kita berusaha untuk semaksimal mungkin meningkatkan produktivitas dari pada para petani itu Pak.

Mungkin program Makmur ini sendiri mengintegrasikan antara penggunaan penyediaan pupuk, kemudian juga pemilihan benih, kemudian juga kami menyediakan apa namanya *off taker*-nya Pak, *off taker* dari pada hasil ini, kemudian juga asuransi seandainya terjadi masalah apa namanya bencana alam, dan tentunya pendampingan itu sendiri. Dan kami bekerja sama dengan perbankan juga untuk menyediakan *financing*-nya. Nah, program ini

kami namakan program Makmur Pak, dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan hasil tani.

KETUA RAPAT:

Cukup?

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Iya, terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Yang saya maksudkan mungkin nggak PIHC mengadakan Bimtek di sebagian wilayah Anggota Komisi IV DPR RI, penyelenggaranya Bapak.

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Kami tentunya terbatas Pak, kami tidak mempunyai jumlah orang yang cukup, kecuali dibantu oleh para penyuluh lapangan Pak.

KETUA RAPAT:

Ya silakan nanti koordinasi saja dengan Kementerian Pertanian, tapi sanggup?

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Tentunya kami tidak akan sanggup kalau untuk seluruh ini, karena memang kami sebenarnya kami sebagai produsen Pak, perlu dibantu oleh pertanian.

KETUA RAPAT:

Tadikan saya katakan Pak Sekjen siap *mem-backup*, sudah Pak Sekjen siap *backup*.

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Oh, ya siap saja Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, kita dengan Bimtek nanti ya. Mungkin dalam rekomendasi Panja Pupuk akan saya masukkan itu.

DIRUT PT PUPUK INDONESIA *HOLDING COMPANY*:

Ya, terima kasih Pak, kalau memang ada Bimtek kami sangat terbantu.

KETUA RAPAT:

Ya, oke terima kasih.

Sebelum kami mengakhiri Rapat Kerja ini, silakan Pak Wakil Menteri untuk menyampaikan kata penutupnya.

WAKIL MENTERI PERTANIAN RI:

Baik, syukur *Alhamdulillah* bahwa Rapat Kerja hari ini *Insy Allah* mudah-mudahan berjalan sukses, juga dapat diterima semua pihak, baik dari kawan-kawan DPR RI, juga kami rombongan kami ada Kementerian Pertanian dan Pupuk PIHC dalam hal ini diwakili oleh Pak Bakir dan kawan-kawan.

Insy Allah mudah-mudahan ke depan kami akan berusaha, berupaya memperbaiki diri di Kementerian Pertanian untuk menjawab semua tantangan masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh kawan-kawan di DPR RI Komisi IV. Terima kasih, dengan demikian kami mohon pamit.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamit Tharieq,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja hari ini. Kami atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan. Dengan mengucapkan *Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, Rapat Kerja hari ini kami tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.00 WIB)

Jakarta, 20 September 2021

a.n. KETUA RAPAT
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Achmad Agus Tommy
NIP. 196508171988031002